

**PERAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
BELAJAR PADA SMP NEGERI 1 SIANTAR**

SKRIPSI

Oleh :

**Putri Aulia Hasanah Pane
208520072**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
BELAJAR PADA SMP NEGERI 1 SIANTAR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh :

**Putri Aulia Hasanah Pane
208520072**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)11/10/24

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri Siantar

Nama : Putri Aulia Hasanah Pane
NPM : 208520072
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Tanggal

Mengetahui :



Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.I.P
Dekan



Drs. Indra Muda, MAP
Ketua Program Studi

Tanggal Lulus : 09 Agustus 2024

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 09 Juli 2024



Putri Aulia Hasanah Pane
208520072

**HALAMAN PERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Aulia Hasanah Pane
NPM : 208520072
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tugas Akhir Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 09 Juli 2024



Putri Aulia Hasanah Pane
208520072

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Dinas Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar. Masalah difokuskan pada Bagaimana Peran Dinas Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada SMP Negeri 1 Siantar dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar. Data-data dikumpulkan melalui Observasi, Wawancara serta Dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar cukup berjalan dengan baik, yang dimana pada indikator peran sebagai strategi dan peran sebagai alat komunikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dalam implementasi Kurikulum Merdeka belajar pada Smp Negeri 1 Siantar masih memiliki hambatan. Adapun hambatan yang terjadi pada implementasi Kurikulum Merdeka belajar pada SMP Negeri 1 Siantar yaitu sebagai berikut: Tidak adanya mitra sekolah dalam memberikan pendidikan kecakapan dan keahlian. Akses internet kurang stabil. Kurangnya sumber daya pengawas sekolah yang konsentrasi linearitas mata pelajarannya terbatas tidak mengakumulasi semua bidang studi di sekolah.

Kata Kunci: Implementasi Kurikulum Merdeka; Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun; SMP Negeri 1 Siantar

ABSTRACT

This research aimed to understand and describe the Role of the Education Office in the Independent Learning Curriculum at SMP Negeri 1 Siantar and to analyze the obstacles faced in the Implementation of the Independent Learning Curriculum at SMP Negeri 1 Siantar. The problem is focused on How is the Role of the Education Office in the Implementation of the Independent Learning Curriculum at SMP Negeri 1 Siantar and what obstacles are faced in the Implementation of the Independent Learning Curriculum at SMP Negeri 1 Siantar. Data was collected through Observation, Interviews and Documentation and analyzed qualitatively. It can be concluded that the Role of the Simalungun Regency Education Office in the Implementation of the Independent Learning Curriculum at SMP Negeri 1 Siantar is running quite well, where the indicators of the role as a strategy and the role as a communication tool of the Simalungun Regency Education Office in the implementation of the Independent Learning Curriculum at Smp Negeri 1 Siantar still have obstacles. The obstacles encountered in the implementation of the Independent Learning Curriculum at SMP Negeri 1 Siantar are as follows: The absence of school partners in providing skills and expertise education, Internet access was less stable, the Lack of school supervisor resources whose concentration of subject linearity is limited does not accumulate all fields of study at school.

Keywords: *Implementation of the Independent Curriculum; Simalungun District Education Office; SMP Negeri 1 Siantar*



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pematangsiantar Pada tanggal 23 Oktober 2002 dari Ayah Banua Pane dan Ibu Juliasa Simamora, Penulis merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara dan penulis merupakan anak perempuan satu-satunya didalam keluarga. Penulis menganut Agama Islam. Penulis bertempat tinggal di Jalan Kasiavera III Perumnas Batu Enam, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Tahun 2020 Penulis lulus dari SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi himpunan Mahasiswa Islam pada tahun 2023.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan mengucap syukur atas rahmat, karunia dan juga nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **“Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar”** dengan baik.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim beserta Jajaran, Bapak Dr. Walid Musthafa S., S.Sos., M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Bapak Drs. Indra Muda, MAP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan serta pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini menjadi lebih baik.

Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada cinta pertama dan panutan saya, Bapak Ir. Banua pane, SP. M.Si dan pintu surga saya Ibunda Juliasa Simamora. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan untuk mendukung, mendidik dan mendoakan penulis dalam segala hal baik secara materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia, serta kepada seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Medan, 09 Juli 2024

Penulis,

Putri Aulia Hasanah Pane
208520072

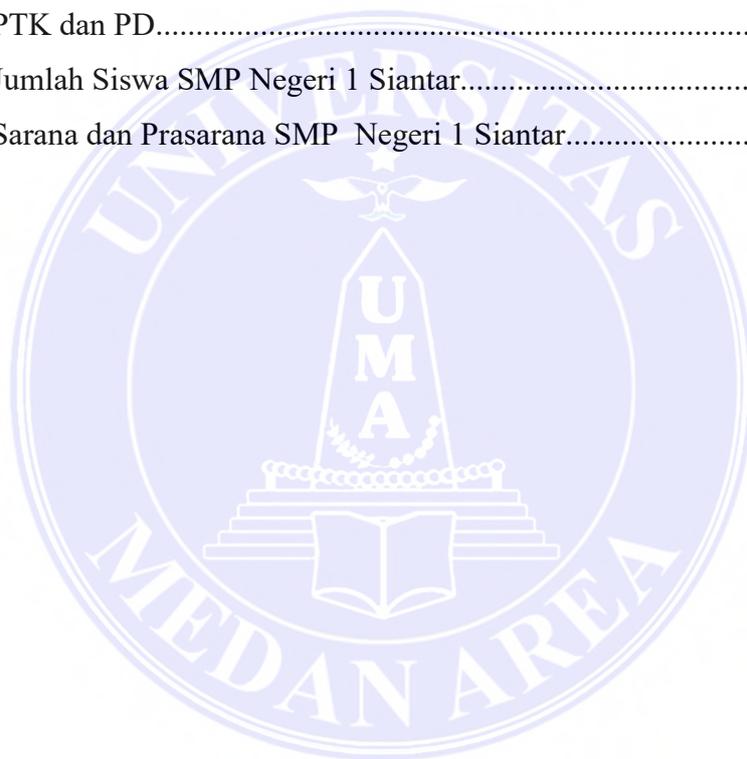
DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.5.1 Manfaat Teoritis	11
1.5.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Peran	13
2.2 Implementasi	15
2.3 Implementasi Kebijakan	17
2.4 Kurikulum Merdeka Belajar	19
2.4.1 Tujuan Kurikulum Merdeka	21
2.4.2 Karakteristik Kurikulum Merdeka	22
2.4.3 Prinsip Pembelajaran Merdeka Belajar	23
2.4.4 Peraturan 56/M/2022	23
2.5 Kerangka Berpikir	24
2.6 Penelitian Terdahulu	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Lokasi dan Tanggal Penelitian	32
3.3 Informan Penelitian	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
4.1.1 Profil SMP Negeri 1 Siantar	38
4.1.2 Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun	38
4.1.3 Gambaran Umum Kabupaten Simalungun	39
4.1.4 Tenaga pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa SMP Negeri 1 Siantar Kabupaten Simalungu	40
4.1.5 Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Siantar Kabupaten Simalungu	41
4.2 Hasil Penelitian	42
4.3 Pembahasan.....	52
4.3.1 Peran Dinas Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar	52
4.3.2 Hambatan yang Dihadapi dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia.....	1
2. Data Jumlah Sekolah SMP di Kabupaten Simalungun Tahun 2023/2024.....	8
3. Data Nama sekolah SMP di Kecamatan Siantar Tahun 2023/2024.....	9
4. Penelitian Terdahulu.....	26
5. Jadwal Penelitian.....	32
6. Informan Wawancara.....	33
7. Data PTK dan PD.....	40
8. Data Jumlah Siswa SMP Negeri 1 Siantar.....	41
9. Data Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Siantar.....	41



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Kerangka Berpikir.....	25
---------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Observasi.....	68
2. Pedoman Wawancara.....	68
3. Hasil Observasi.....	76
4. Deskripsi Hasil Wawancara.....	77
5. Surat Izin Research dan Surat Selesai Research.....	96
6. Surat Edaran.....	100
7. Dokumentasi Survei Penelitian Lapangan.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19 terkait Kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di Indonesia, Kurikulum Pendidikan mengalami beberapa perubahan. Mulai dari Rencana Pelajaran 1947, Rencana Pelajaran Terurai 1952, Rencana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini (kompas.com, Diakses 20 Desember 2022).

Tabel 1. Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia

No.	Kurikulum Pendidikan
1.	Rencana Pelajaran 1947
2.	Rencana Pelajaran Terurai 1952
3.	Rencana pendidikan 1964
4.	Kurikulum 1968
5.	Kurikulum 1975
6.	Kurikulum 1994
7.	Kurikulum 2004
8.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006
9.	Kurikulum 2013
10.	Kurikulum Revisi 2013
11.	Kurikulum Merdeka

(Sumber : kompas.com)

“Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran”. (Permendikbudristek No. 262/M/2022)

Struktur Kurikulum Merdeka berisi tentang aturan terkait pembelajaran dan asesmen, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta beban kerja guru (kemendikbud.go.id). Akhir tahun 2022 ini, beberapa sekolah sudah mulai bergabung dan menjalankan Kurikulum Merdeka. Tentu mereka sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang dan juga proses adaptasi baik dari segi administrasi sampai tataran pembelajaran era Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini merupakan Kurikulum pengganti sebelumnya. Kurikulum sebelumnya ialah Kurikulum 2013, dimana dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada pada materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKn dan beberapa materi lain, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi Matematika. Pada Kurikulum ini guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian untuk siswa itu sendiri, diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antar-personal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis.

Perubahan tersebut dinilai beberapa pakar pendidikan sebagai perubahan positif, sebab cukup banyak menunjang kemerdekaan dalam Pendidikan. karena akan ada banyak aspek yang mengalami perubahan, tentu tidak semua sekolah dapat langsung menerapkannya. Lembaga Pendidikan tersebut memerlukan contoh dan teladan dari sekolah yang sudah mapan dan matang dalam melaksanakannya. Kurikulum harus terus beradaptasi dengan perkembangan

zaman dan juga teknologi. Kurikulum “Merdeka Belajar” menuju Pendidikan ideal, Pendidikan yang siap berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai aspek. Keadaan zaman dijadikan lahan untuk menginovasi Pendidikan mulai dari sistem pembelajaran, keterampilan dan kompetensi mengajar guru.

Kurikulum Merdeka ini sebenarnya siap tidak siap harus diterapkan di sekolah. Implementasi Kurikulum Merdeka berupaya untuk memulihkan pembelajaran demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Pada Kurikulum Merdeka, guru dapat mengenali potensi murid lebih dalam guna menciptakan pembelajaran yang relevan. Kurikulum Merdeka juga memungkinkan guru untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan karena bisa dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek (<https://merdekabelajar.dairikab.go.id/tentang-kurikulum-merdeka-dan-platform-merdeka-mengajar/>, Diakses Juni 2023)

Pelaksanaan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui tiga tahapan berikut:

1. Asesmen diagnostik

Guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan.

2. Perencanaan

Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan.

3. Pembelajaran

Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala, untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran, jika diperlukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran

Kabupaten Paser merupakan sekolah pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menerapkan Kurikulum Merdeka 100%. Pencapaian tersebut terungkap dalam Program satu guru satu laptop sebanyak total 1.443 unit dan Bantuan Seragam Bagi Siswa Tidak Mampu yaitu bagi Sekolah Dasar (baju putih merah dan pramuka) sebanyak 6.461 siswa dan SMP (baju putih biru dan pramuka) sebanyak 3.951 siswa, unit skema Satu Guru Satu Laptop dan bantuan seragam kepada siswa kurang mampu yakni kepada total 6.461 siswa SD (Baju Putih dan Baju Merah serta Pramuka), SMP (Baju Putih Biru dan Pramuka) menampung sebanyak 3.951 siswa di Pendopo Lou Bapekat. Dr Fahmi Fadli, Bupati Parser, sangat mengapresiasi hal tersebut. Ia memuji keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser yang dinobatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menerapkan Kurikulum Merdeka 100%.

Dinas Pendidikan dan Budaya (Disdikbud) tidak merasa cepat puas dengan banyaknya sekolah namun, terus berupaya meningkatkan kualitas IKM Satuan Pendidikan agar profil siswa Pancasila benar-benar tertanam dalam diri setiap siswa. “Saat ini berbagai upaya terus dilakukan, antara lain dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat guru dan kepala sekolah tentang IKM. Kerjasama

dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (BPMP) untuk meningkatkan penguatan IKM di Kabupaten Paser. unit melalui Yayasan Bosnas,” kata Kepala Dinas Pendidikan, M. Yunus Syam.

Dinas Pendidikan dan Budaya juga terus melakukan sosialisasi penggunaan platform Merdeka Mengajar (PMM) yang dapat digunakan oleh satuan Pendidikan jika menemui kendala dalam IKM. Kemudian menggelar bimbingan teknis secara daring atau luring kepada tenaga pengajar untuk meningkatkan IKM di seluruh satuan Pendidikan. Dan selanjutnya sebagai pedoman bagi UKM di Kabupaten Paser akan diusulkan rancangan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi UKM di Kabupaten Paser(humas.paserkab.go.id, diakses : 31 Desember 2022).

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, Kurikulum Merdeka Belajar resmi diperkenalkan ke masyarakat umum sebagai Kurikulum baru yang akan menjadi pengganti Kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka Belajar sendiri merupakan Kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam Dimana informasi akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup Tanggal untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka Belajar SMP adalah Kurikulum baru yang diterapkan pada jenjang Pendidikan SMP dengan keberagaman pembelajaran intrakurikuler agar siswa dapat menyesuakannya dengan kompetensi dan bakat yang dimiliki.

Pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka ini memberikan siswa kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang paling sesuai dengan bakat, minat, dan

kemampuan yang dimiliki. Selain itu, Kurikulum ini juga memberikan kebebasan pada guru dalam memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Sejak diperkenalkan pada awal tahun 2022 lalu, Kurikulum Merdeka Belajar ini sudah mulai diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia, baik pada jenjang Pendidikan PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Penerapan Kurikulum baru ini akan terus berlanjut hingga di tahun 2024 semua sekolah sudah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. (quipper.com, Di akses : 8 Januari , 2023)

Dinas Pendidikan Simalungun menyebut ada 149 sekolah Negeri dari 966 sekolah di kabupaten ini, yang menerapkan Kurikulum Merdeka pada 2023. Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Simalungun, Sahman Dabalok mengatakan, konsep atau konten Kurikulum Merdeka berbeda dari pola pembelajaran biasanya. Adapun akan ada tiga kategori yang diterapkan yakni mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi.

Implementasi Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek memberikan dukungan pembelajaran implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri dan dukungan pendataan implementasi Kurikulum Merdeka jalur mandiri. Berdasarkan pendataan tersebut akan didapatkan calon satuan Pendidikan yang berminat dan mereka akan memperoleh pendampingan pembelajaran untuk implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri. bagi satuan Pendidikan yang akan mengimplementasi Kurikulum Merdeka dapat memilih salah satu dari tiga tingkatan opsi, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. (SMPnsatukurun.sch.id, diakses : 8 Februari 2023).

Kurikulum Merdeka Belajar dibagi menjadi tiga opsi dan berikut ini adalah perbedaan antara Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Implementasi.

1. Mandiri Belajar

Satuan Pendidikan menggunakan struktur Kurikulum 2013 dalam mengembangkan Kurikulum satuan Pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Pilihan Mandiri Belajar memberikan kebebasan kepada satuan Pendidikan saat menerapkan Kurikulum Merdeka beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti Kurikulum satuan Pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan Pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7, dan 10.

2. Mandiri Berubah

Satuan Pendidikan menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan Kurikulum satuan Pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Mandiri Berubah memberikan keleluasaan kepada satuan Pendidikan saat menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan Pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7, dan 10.

3. Mandiri Berbagi

Satuan Pendidikan menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan Kurikulum satuan Pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen, dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan Pendidikan lain. Pilihan Mandiri Berbagi akan memberikan keleluasaan

kepada satuan Pendidikan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan Pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10

Kategori mandiri belajar masih akan mengadopsi Kurikulum 2013. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Simalungun, Sahman Dabalok menjelaskan bahwa Kurikulum berubah namun polanya akan lebih disederhanakan. Sementara Kurikulum berbagi, murni dengan metode Kurikulum Merdeka, Dimana sekolah yang menerapkan menjadi penggerak. Pada 2023 nanti, akan dimulai dengan 149 sekolah yang akan menerapkannya, itu terdiri dari tingkat Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak 4 sekolah, tingkat sekolah dasar (SD) 127 sekolah dan tingkat sekolah menengah pertama (SMP) 18 sekolah (parboaboa.com, diakses: 11 Oktober 2022).

Tabel 2. Data jumlah sekolah SMP di Kabupaten Simalungun Tahun 2023/2024

No.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	
	Negeri	Swasta
1.	65	92

(Sumber : dapo.kemdikbud.go.id/)

Sekolah yang ada di Kabupaten Simalungun berjumlah 1.575 sekolah. Dimana 841 sekolah Negeri dan 734 sekolah swasta. Jumlah sekolah lain di luar tabel di atas, misalnya terdapat 2 sekolah Negeri dan 163 sekolah swasta untuk TK, 744 sekolah Negeri dan 66 sekolah swasta untuk SD, 326 sekolah swasta untuk kelompok bermain (KB), Taman Pendidikan Al Quran (TPA.), Prasekolah sejenis (SPS) ada 7, sekolah swasta ada 7, sekolah swasta di Akademi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ada 11, sekolah kegiatan belajar Negeri

(SKB) ada 1, ada 1 Sekolah Luar Biasa terdapat Sekolah Negeri (SLB) dan 1 Sekolah Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) mempunyai 20 sekolah Negeri dan 28 sekolah swasta, dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai 8 sekolah Negeri dan 40 sekolah swasta.

Tabel 3. Data Nama sekolah SMP di Kecamatan Siantar Tahun 2023/2024

No.	Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1.	SMP Negeri 1 Siantar
2.	SMP Negeri 2 Siantar
3.	SMP Pembaharuan
4.	SMP Swasta Assisi Siantar
5.	SMP Swasta HKPB Batu IV
6.	SMP UISU

(Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id/>)

Tabel diatas merupakan nama-nama sekolah yang ada di Kabupaten Simalungun tepatnya pada Kecamatan Siantar. dalam hasil Pra observasi, peneliti menemukan bahwasanya SMP Negeri 1 Siantar juga merupakan salah satu SMP yang tidak menerapkan secara efektif Kurikulum Merdeka. Sehingga Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Pendidikan dalam penerapan Kurikulum Merdeka belajar di SMP Negeri 1 Kabupaten Simalungun. Seperti pada tabel 1.1, peneliti menyajikan jumlah sekolah SMP yang ada di Kabupaten Simalungun. Namun, peneliti lebih fokus peran Dinas Pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Kabupaten Simalungun tepatnya pada Kecamatan Siantar.

Hasil Pra observasi dari peran Dinas Pendidikan dalam penerapan Kurikulum Merdeka belajar memiliki korelasi dengan keilmuan Administrasi Publik, karena dalam Administrasi Publik mengkaji sistem ketatanegaraan suatu negara yang berhubungan dengan publik yang mencakup, organisasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, dan pelayanan publik. Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab dalam menentukan kebijakan program dari pemerintah, Dimana Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan operasi pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi penyelenggaraan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pemantauan internal; promosi kepada Masyarakat dan pelayanan konsultasi.

Judul penelitian ini termasuk ke dalam Administrasi Publik pada bagian pelayanan. Pelayanan sektor Pendidikan ini termasuk kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, Dimana pemerintah membuat program Kurikulum Merdeka belajar ini untuk dijalankan sesuai perencanaan yang sudah ditentukan untuk kepentingan umum.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum meratanya implementasi Permendikbudristek No. 262/M/2022, Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran”.
2. Adanya kesulitan memahami pergantian Kurikulum Merdeka belajar

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada SMP Negeri 1 Siantar ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Dinas Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan pada peneliti dan dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama peneliti kuliah di jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu administrasi publik, yang berkaitan dengan Peran Dinas Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis bagi penulis, berguna sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan metodologis

serta memiliki kemampuan dalam menganalisis setiap gejala dan permasalahan dilapangan. Tentu ini memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama bagi mereka yang secara serius mengamati jalannya Peran Dinas Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar serta dapat dijadikan sebagai kontribusi terhadap pemecahan permasalahan yang terkait dengan program tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

"Peran berarti perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat..." (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:854)

Veithzal Rivai dan Sylviana Murni (2009:245), menjelaskan bahwa, "peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu". Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan Pendidikan Tinggi, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) suatu posisi, diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sikap tanggung jawab dan profesional dari pemegang peran tersebut. Berdasarkan definisi di atas penulis menarik simpulan, peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat atau sebuah lembaga. Dalam hal ini, pimpinan perlu menjalankan perannya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto,2002; Soekamto,1984: 237).

David Berry (2003:105), mendefinisikan peranan sebagai harapan harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Penjelasan menurut beberapa para ahli dapat di ambil kesimpulan bahwa peran merupakan serangkaian kegiatan seseorang dengan kedudukan (status) yang melekat pada dirinya dengan melaksanakan fungsinya yang sesuai dengan kedudukannya. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan, Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi, Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi, di dayagunakan sebagai instrumen atau alat

untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Teori yang saya gunakan adalah teori yang memiliki korelasi yang sangat dekat dengan studi peran dalam penelitian saya nanti. Sehingga saya mengambil Teori menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45) karena keempat variabel dalam model yang dibangun oleh beliau memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan dan sasaran program atau kebijakan. Jadi semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan.

2.2 Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan

mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan. Implementasi mewujudkan gagasan, konsep, kebijakan atau inovasi ke dalam tindakan praktis sehingga menimbulkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan dan merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu serta dalam jangka Tanggal tertentu. Pada hakikatnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui program-program yang dapat mencapai implementasi kebijakan.

Penulis Amerika menggunakan istilah 'implementasi' untuk menunjuk semua kegiatan yang melibatkan pelaksanaan undang-undang. Istilah ini, yang juga diadopsi di Jerman oleh Program politischer Implementasi Forschungsverbund (Research Association for the Implementation of Political Programmes) (bdk. Bohnert dan Klitzsch, 1980), memasukkan ke dalam konsep 'implementasi' semua proses politik administrasi yang mengikuti dari pengambilan keputusan parlementer. Dengan demikian, pengertian ini mencakup pengembangan semua unsur program politik administrasi yang terkandung dalam keputusan pemerintah yang tidak tunduk pada keputusan parlemen yang terpisah.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Yang mempunyai arti bahwa untuk

mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagai serangkaian proses setelah fase pemrograman yang ditujukan untuk realisasi nyata dari tujuan kebijakan publik. Definisi ini tidak mencakup ketentuan peraturan oleh otoritas pemerintah dan administrative melalui keputusan atau keputusan pemerintah sederhana. Terlepas dari dorongan yang sebagian serupa dari dua tahap siklus hidup kebijakan ini. para aktor sebenarnya sering mengejar strategi yang berbeda (Kaufmann dan Rosewitz, 1983, hal. 32).

Implementasi kebijakan merupakan bagian dalam upaya memahami kebijakan secara komprehensif. Pada gilirannya, pemahaman itu menggiring pada pemahaman mengenai implementasi kebijakan dalam bidang Pendidikan. Bahkan, implementasi kebijakan Pendidikan seringkali berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan

Implementasi kebijakan ialah hal yang paling berat, karena di ini masalah-masalah yang kadang tidak di jumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Nugroho (2009) Selain itu, ancaman utama dalam hal ini adalah konsistensi dalam proses implementasinya. Sehingga di butuhnya model-model implementasi

kebijakan, ada yang bersifat abstrak, ada pula yang bersifat lebih operasional. Berkenaan dengan kepentingan analisis, yang perlu disikapi ialah bahwa semakin kompleks masalah dan semakin dalam analisis yang dilakukan, diperlukan model yang lebih bersifat operasional.

Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1994), menyatakan bahwa "implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program".

Winarno (2008) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan Tanggal tertentu. Sementara itu Mufiz (1999), menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan publik tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut

kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan.

2.4 Kurikulum Merdeka Belajar

Kemendikbudristek resmi meluncurkan Kurikulum Merdeka pada Februari 2022. Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai passion yang dimilikinya. Secara umum, Kurikulum Merdeka merupakan Kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dimana, Konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai Tanggal yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum ini untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.

Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran (*learning crisis*) yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan Pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai

tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui Kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikburistek mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam Upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami.

Inti dari Kurikulum Merdeka ini adalah Merdeka Belajar. Hal ini di konsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Penerapan Kurikulum Merdeka terbuka untuk seluruh satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Kesetaraan. Selain itu, satuan Pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kePendidikan dan satuan Pendidikan dalam pengembangan Kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan Pendidikan sehingga implementasi Kurikulum Merdeka semakin efektif jika makin sesuai kebutuhan.

Nadiem Makarim selaku Kemendikbud secara tegas menyebutkan bahwa konsep “Merdeka Belajar” yang digagasnya merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga Pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu Pendidikan di lembaganya. Perubahan besar kebijakan Merdeka Belajar dengan

Kurikulum 2013 adalah (1) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah; (2) Ujian Nasional (UN) berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter; (3) kebebasan pendidik untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan (4) fleksibilitas dalam peraturan penerimaan siswa baru (PPSB) (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2020).

Kebijakan “Merdeka Belajar” menuju Pendidikan ideal merupakan kemerdekaan berpikir. Pendidikan dengan sistem Pendidikan nasional berupaya melakukan pembentukan masa depan bangsa (Yamin, 2020). Permasalahan yang dihadapi para pendidik sebagai ujung tombak Pendidikan adalah perbedaan atau keberagaman wawasan dan skill yang dimiliki guru untuk menerapkan Kurikulum yang telah dirancang di dalam kelas. Berbagai penyesuaian dan juga strategi digunakan oleh guru dalam rangka menghasilkan pembelajaran yang efektif.

2.4.1 Tujuan Kurikulum Merdeka

Menurut Pusmenjar (2022) ada beberapa tujuan Kurikulum Merdeka yaitu:

1. Menciptakan Pendidikan yang Menyenangkan Tujuan Kurikulum Merdeka yang pertama yaitu menciptakan Pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Kurikulum ini menekankan Pendidikan Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai- nilai bangsa Indonesia.
2. Mengejar Ketertinggalan Pembelajaran. Salah satu tujuan Kurikulum Merdeka adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang

disebabkan oleh pandemi covid-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar Pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswanya diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran.

3. Mengembangkan Potensi Peserta Didik Kurikulum ini dibuat sederhana dan fleksibel sehingga pembelajaran akan lebih mendalam. Selain itu Kurikulum Merdeka juga berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya.

Dengan adanya Kurikulum Merdeka, diharapkan mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, Dimana Kurikulum ini lebih menekankan pada kebebasan peserta didik. Kurikulum ini juga memudahkan para guru dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik.

2.4.2 Karakteristik Kurikulum Merdeka

Karakteristik utama dari Kurikulum Merdeka yang membedakannya dengan Kurikulum lain ialah:

1. Fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam.
2. Tanggal lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila).
3. Capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran fleksibel.
4. Memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan Kurikulum satuan Pendidikan.
5. Mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.

2.4.3 Prinsip Pembelajaran Merdeka Belajar

Adapun Prinsip Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka mencakup tiga tipe kegiatan pembelajaran, yaitu:

1. Pembelajaran Intrakurikuler
Pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup Waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
2. Pembelajaran Kokurikuler
Pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dengan prinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum
3. Pembelajaran Ekstrakurikuler
Pembelajaran ekstrakurikuler ialah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan.

2.4.4 Peraturan 56/M/2022

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri yang merupakan pilihan bagi satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan masing-masing.

Satuan Pendidikan yang memilih menggunakan Kurikulum Merdeka, dimana ada 3 (tiga) pilihan kategori implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu:

- a. Mandiri Belajar, Satuan Pendidikan menggunakan struktur Kurikulum 2013 dalam mengembangkan Kurikulum satuan Pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen.

- b. Mandiri Berubah, Satuan Pendidikan menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan Kurikulum satuan Pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen.
- c. Mandiri Berbagi, Satuan Pendidikan menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan Kurikulum satuan Pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen, dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan Pendidikan lain.

2.5 Kerangka Berpikir

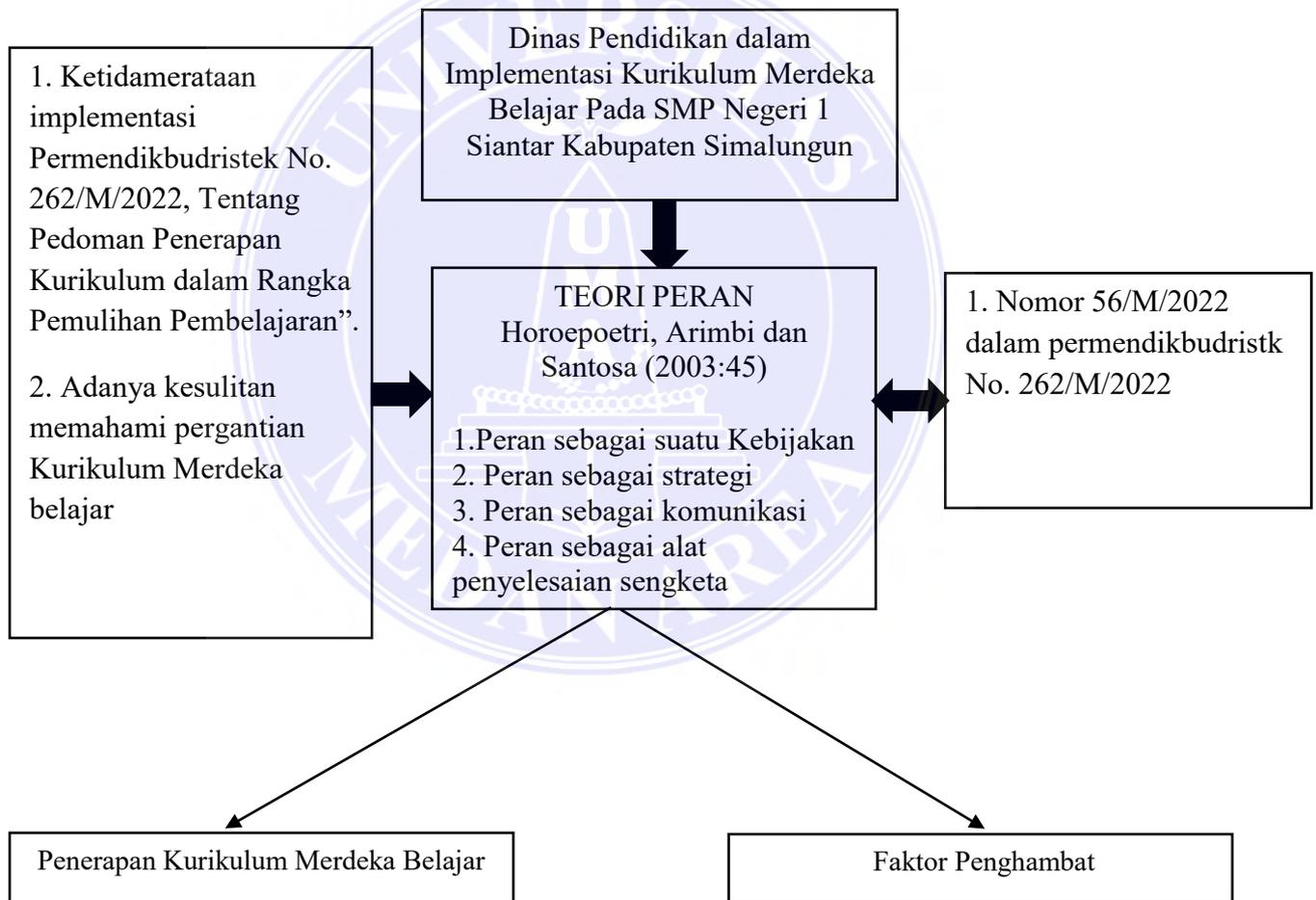
Menurut Plano (2010 : 266) kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam ilmu pengetahuan empiris (ilmu politik dan ilmu pemerintahan), teori mengacu pada kaitan yang logis pada perangkat profesi yang memastikan adanya hubungan diantara variabel-variabel dengan maksud dengan menjelaskan kedua-duanya. Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penelitian.

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini, penelitian merangkai sebuah kerangka berfikir terhadap objek yang akan diteliti.

Kerangka berfikir inilah fokus utama yang nantinya akan peneliti bahas pada penelitian observasi seperti pada gambar 2.1. Dimana penelitian ini menggunakan teori Horoeopetri, Arimbi dan Santosa (2003:45) yang memiliki empat indikator, seperti Peran sebagai suatu Kebijakan, Peran sebagai strategi, Peran sebagai komunikasi, dan Alat penyelesaian sengketa. Indikator tersebut akan berkaitan

dengan implementasi Kurikulum Merdeka belajar serta faktor penghambat dalam implementasi Kurikulum Merdeka belajar. adapun masalah yang akan di bahas oleh peneliti yaitu, Belum meratanya implementasi Nomor 56/M/2022 dalam Permendikbudristek No. 262/M/2022, Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran” pada SMP Negeri 1 Siantar Kabupaten simalungun serta Adanya kesulitan memahami pergantian Kurikulum Merdeka belajar

Gambar 1. Kerangka Berfikir



Sumber: Di olah peneliti, 2023

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kajian pustaka berupa penelitian yang ada. Studi penelitian terdahulu sangat penting sebagai bahan acuan yang membantu peneliti dalam merumuskan asiansi dasar, untuk mengembangkan “Peran Dinas Pendidikan Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar”. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang dijadikan sebagai referensi (Sumber : elib.unikom.ac.id/, 2013)

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun/Sumber	Judul	Uraian	Hasil Penelitian
1.	Dhimar Dwijayanti, Setia Ardani/2017/Skripsi	Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dalam Melaksanakan Program Bantuan Siswa Miskin.	<ul style="list-style-type: none"> - Metode : metode pendekatan yuridis sosiologis - Teori : - - Variabel : Peran Dinas Pendidikan - Fokus : Program bantuan siswa miskin - Lokasi : Kabupaten Kendal - J.informan : -Pengumpulan data : - - Analisis data : - 	Sesuai dengan data diatas dapat disimpulkan mengenai pemberian bantuan tidak ada 100% yang menerima, seperti di Kecamatan Patean yang seharusnya menerima tidak ada sama sekali atau 0%, tidak sesuai dan berbanding terbalik dengan Kecamatan Limbangan yang sebagian anaknya masih mendapatkan atau menerima haknya dalam pemberina bantuan biaya Pendidikan yang diberikan oleh Kabupaten Kendal dengan prosentasi 6.88%, Namun masih tidak sesuai yang diamanatkan oleh UUD bahwa sebagian 20% dana APBD untuk pembiayaan atau pendanaan dalam Pendidikan, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerimaan BSM untuk melaporakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.
2.	Jarot Sutrisno, Zulkarnaen, Mochtaria M.Noh/2012/	Peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam	<ul style="list-style-type: none"> - Metode : pendekatan Deskriptif 	Pembinaan dan pengembangan olahraga yang di mulai anak usia dini atau

No.	Nama/Tahun/Sumber	Judul	Uraian	Hasil Penelitian
	Jurnal Tesis PMIS-UNTAN- IAN	Meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Pontianak	<p>- Teori : -</p> <p>- Variabel : Peran Dinas Pendidikan</p> <p>- Fokus : Meningkatkan prestasi olahraga</p> <p>- Lokasi : Kabupaten pontianak</p> <p>- J.informan : -</p> <p>- Pengumpulan data : Wawancara, observasi dan dokumentasi</p> <p>- Analisis data : Pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan</p>	<p>usia</p> <p>sekolah sebagai langkah awal pembinaan mengarah pada pembinaan prestasi. Hal ini tentu tidak terlepas dari sistem pembinaan, tenaga keolahragaan, sarana prasarana dan pendanaan. Untuk kelangsungan pembinaan dan pengembangan olahraga dalam meningkatkan prestasi, saran yang dapat disampaikan dalam skala prioritas, yakni :</p> <p>a. Kualitas Sumber Daya Manusia Agar memadai baik jumlah maupun kualitas, perlu adanya peningkatan mutu melalui Pendidikan, latihan maupun penataran pelatih dan wasit serta tenaga keolahragaan lainnya sehingga mempunyai pengalaman pengelolaan dan manajemen keolahragaan.</p> <p>b. Komplek Latihan</p> <p>Idealnya, dalam peningkatan prestasi olahraga perlu adanya pemusatan latihan (training camp) dalam format sport centre ini dimiliki oleh Kabupaten Pontianak, didasarkan prestasi yang diraih dan dijadikan sebagai olahraga unggulan.</p> <p>c. Sistem Pembinaan Intensif, Kurikulum Pendidikan di sekolah dalam pelajaran olahraga dibedakan menjadi dua (2) yaitu Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler. Intrakurikuler dijalankan dengan tujuan meningkatkan derajat kebugaran bagi siswa. Sedangkan Ekstrakurikuler dilakukan untuk menyalurkan bakat dan minat.</p> <p>d. Anggaran Hal yang tak bisa</p>

No.	Nama/Tahun/Sumber	Judul	Uraian	Hasil Penelitian
				<p>dipisahkan dari pembinaan adalah penghargaan kepada mereka yang telah berkorban baik tenaga, Tanggal, bahkan biaya dalam proses latihan. Penghargaan yang memadai terhadap pengabdian dan perjuangan mereka menjadikan mereka lebih manusiawi, tidak terkesan habis manis sepagh di buang.</p>
3.	Rani Reka manurung/2020/Skripsi	Peran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Autis	<p>- Metode : deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif</p> <p>- Teori : Biddle dan Thomas dalam sarwono (2013:215)</p> <p>- Variabel : Peran Dinas Pendidikan</p> <p>- Fokus : Upaya Pengembangan sekolah luar biasa (SLB) Negeri autis</p> <p>- Lokasi : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara</p> <p>- J.informan : 3 Orang</p> <p>- Pengumpulan data : Observasi,wawancara, dokumen metode observasi, dokumentasi dan wawancara</p> <p>- Analisis data : Pengumpulan data, Reduksi</p>	<p>peran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Autis adalah dengan melakukan Pengkoordinasian, Mengawasi dan Mengupayakan Pengelolaan Manajemen layanan agar lebih baik, Memantau dan melaporkan pembelajaran kinerja kepala sekolah dan kinerja guru, menyelenggarakan kebijakan, mengizinkan operasional tingkat Pendidikan anak berkebutuhan khusus dan pemerataan Pendidikan terhadap anak yang berkebutuhan khusus, bersosialisasi kepada orang tua ataupun masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus sangatlah penting mendapatkan Pendidikan.</p>

No.	Nama/Tahun/Sumber	Judul	Uraian	Hasil Penelitian
			data, penyajian data dan kesimpulan data.	
4.	Sari Nur Aini/2010/Tesis	Peran Dinas Pendidikan terhadap peningkatan kualitas Pendidikan sekolah dasar di kota metro	<ul style="list-style-type: none"> - Metode : Pendekatan Kualitatif - Teori: Langgulong (1988:6) - Variabel : Peran Dinas Pendidikan - Fokus : Peningkatan Kualitas Pendidikan - Lokasi : Kota Metro - J.informan : 8 responden - pengumpulan data : data campuran atau mix method. - Analisis data : - 	Dinas Pendidikan Kota Metro berperan dengan baik secara normatif dalam meningkatkan kualitas Pendidikan dasar. Dinas Pendidikan perlu melaporkan hasil evaluasi proses pembelajaran secara berkala kepada pemangku kepentingan dan menggendeng Dewan Pendidikan Kota Metro sebagai mitra utama dalam menentukan strategi peningkatan kualitas Pendidikan, mutasi sebagian guru-guru yang dianggap berkualitas pada sekolah favorit kepada sekolah dasar yang kurang dianggap kurang favorit, kepala sekolah melakukan penilaian kompetensi apa yang kurang pada bawahannya (guru-guru di sekolah tersebut) kemudian Dinas Pendidikan diharapkan dapat menyediakan semacam diklat peningkatan kompetensi yang dinilai kurang tersebut dan pengaturan mengenai anggaran Pendidikan yang konsisten (tidak berkurang secara signifikan) dan terpisah antara pembiayaan rutin untuk gaji pendidik dan tenaga kePendidikan dengan anggaran untuk peningkatan mutu Pendidikan.
5.	Fadhilah & Syahril/2019/Jurnal Studi pemikiran, riset dan pengebangan Pendidikan Islam	Peran Dinas Pendidikan dalam peningkatan mutu Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Metode : deskriptif kualitatif dengan Teknik purposive sampling. - Teori : - - Variabel : Peran Dinas Pendidikan - Fokus : Peningkatan mutu 	Peranan pemerintah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi Pendidikan di suatu daerah, hal ini diatur di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dikuatkan oleh undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai pemangku kebijakan di suatu daerah, pemerintah sudah sepatutnya

No.	Nama/Tahun/Sumber	Judul	Uraian	Hasil Penelitian
			Pendidikan - Lokasi : Kabupaten Aceh Jaya - J.informan : - - Pengumpulan data : wawancara, observasi dan dokumentasi. - Analisis data : -	mampu mencetak lulusan atau generasi penerus bangsa yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Di dalam hal ini apabila Pendidikan di suatu daerah tidak diperhatikan, maka akan terjadi penurunan tingkat kualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah tersebut. Adanya ikut campur urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dapat berpengaruh baik bagi peningkatan kualitas Pendidikan Masyarakat.

(Sumber :Di olah Peneliti, 2023)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan Penelitian ini ialah Penelitian ini berfokus pada Kurikulum Merdeka Belajar yang belum dilaksanakan oleh lima penelitan terdahulu sebelumnya. Teori yang peneliti gunakan juga berbeda dari penelitian terdahulu, dimana dalam lima penelitan tersebut masih ada yang tidak menggunakan teori peran. Perbedaan lokasi, dan cara analisis data juga menjadi alasan dalam Penelitian ini. selain itu jumlah dari informan juga berbeda. Adapun Persamaan peneliti pada Penelitian terdahulu dalam Teknik pengumpulan dana, seperti menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teori mengenai suatu cara atau metode.

John W. Creswell dalam buku *Research Design* “Metode penelitian kualitatif (Creswell 2013).” merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis serta secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan”.

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan Tanggal yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas,

proses, dan program (Creswell, 2016). Jenis penelitian studi kasus ini sesuai sebagai metode untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.

3.2 Lokasi dan Tanggal Penelitian

Penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada SMP Negeri 1 Siantar, JL. Mahoni Raya No. 06 Perumnas Batu VI, Desa Sitalasari Kecamatan Siantar. Analisis ini dimulai sejak judul tugas akhir ini disetujui oleh Dosen pembimbing. Kemudian Tanggal yang akan digunakan dari persiapan penyusunan tugas akhir ini dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 5. Jadwal Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Sept 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	July 2024	Agust 2024
1.	Pengajuan Judul	■											
2.	Penyusunan Proposal		■	■									
3.	Seminar Proposal				■								
4.	Perbaikan Proposal					■							
5.	Penelitian						■						
6.	Penyusunan Skripsi							■	■				
7.	Seminar Hasil									■			
8.	Perbaikan Skripsi										■	■	
9.	Sidang Meja Hijau												■

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian berangkat dari kasus tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditranferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh karena itu, situasi sosial yang diamati secara mendalam oleh peneliti adalah pengamatan terhadap kebijakan penerapan Kurikulum Merdeka belajar di SMP Negeri 1 Siantar.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

Dalam penelitian untuk menentukan sampel atau informan yang digunakan dalam penelitian, yang menjadi informan dalam penelitian tersebut adalah:

Tabel 6. Informan wawancara

No.	Nama	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Sudiahman Saragih, SH	Kepala Dinas Pendidikan	1 Orang	Informan Kunci
2.	Uli Purba	Kabid Dinas Pendidikan	1 Orang	Informan Utama
3.	Jesli Silitonga	Wakil Bidang Kurikulum	1 Orang	Informan Utama
4.	Sarupah dan Christoni Panjaitam	Guru	2 Orang	Informan Pendukung
5.	Tiurma Dan windy	Siswi kelas 7	2 Orang	Informan Pendukung
6.	Dina Lorencia Manurung	Siswi kelas 9	1 Orang	Informan Pendukung
Jumlah			8 Orang	

(Sumber : Diolah Peneliti, 2023)

1. Informan kunci, yaitu yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti yang diperlukan peneliti yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pendidikan
2. Informan utama, yaitu yang merujuk pada seseorang dalam memberikan penjelasan dalam terkait topik yang dibahas sipeneliti. informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Siantar.
3. Informan pendukung, yaitu sebagai orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitan kualitatif seperti Guru dan Siswa-Siswi SMP Negeri 1 Siantar.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang tidak terbahasakan yang tidak didapat hanya dari wawancara. Seperti yang dinyatakan Creswell adalah “peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas dilokasi penelitian. Creswell (2016:254), Pengalaman berperan serta strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis suatu dokumen, wawancara, partisipasi, dan observasi langsung, sekaligus dengan melakukan intropeksi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas individu – individu dilokasi penelitian

2. Wawancara

Menurut Arikunto (2006: 155) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan cara tatap muka antara pewawancara dan informan agar memperoleh data, keterangan, pandangan, serta pendapat dari responden agar diperoleh informasi yang relevan. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari informan. Pengumpulan data dilakukan melalui pertanyaan secara lisan dengan partisipan.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006: 158) dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku serta peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini untuk dimanfaatkan agar dapat menunjang dua penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Creswell (2013;274) merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari partisipasi. Analisis data kualitatif yang dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dalam buku-buku ilmiah sering kali menjadi model analisis yang umum digunakan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana dianggap yang menjadi pusat penelitian lapangan.

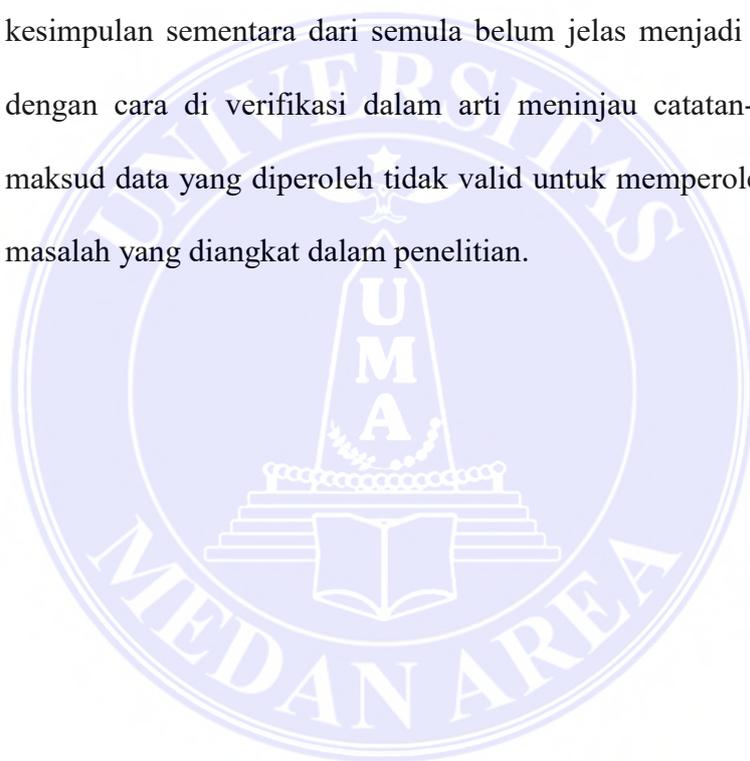
3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis

memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyerderhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.

4. Kesimpulan Data

Setelah data disajikan maka dilakukan kesimpulan data atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

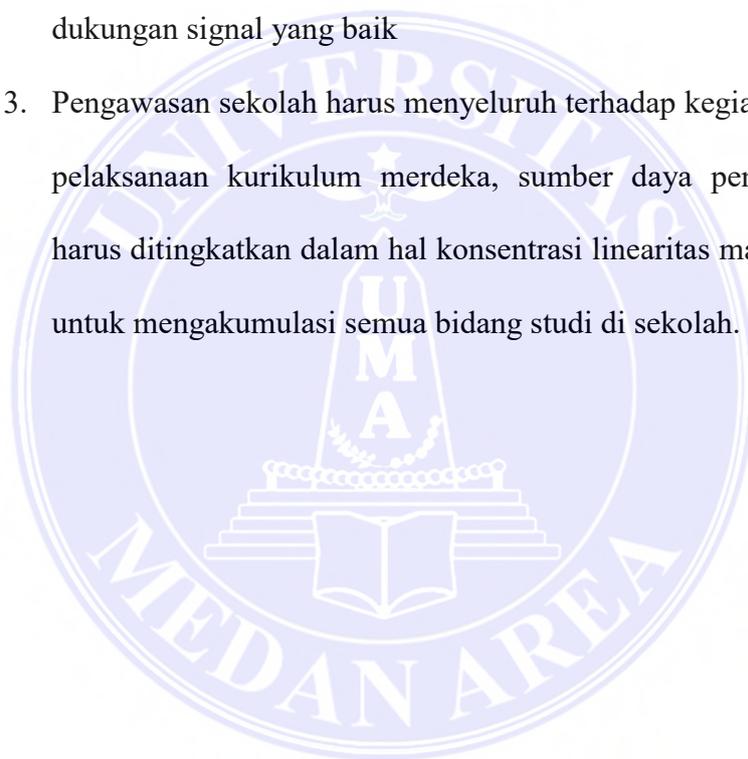
5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar cukup berjalan dengan baik, yang dimana pada indikator peran sebagai strategi dan peran sebagai alat komunikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dalam implementasi Kurikulum Merdeka belajar pada Smp Negeri 1 Siantar masih memiliki hambatan.
2. Hambatan yang terjadi pada implementasi Kurikulum Merdeka belajar pada SMPN 1 Siantar yaitu sebagai berikut: Tidak adanya mitra sekolah dalam memberikan pendidikan kecakapan dan keahlian.. Akses internet kurang stabil. Kurangnya sumber daya pengawas sekolah yang konsentrasi linearitas mata pelajarannya terbatas tidak mengakumulasi semua bidang studi di sekolah.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti memberikan masukan sebagai berikut :

1. SMP Negeri 1 Siantar di harapkan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra untuk melatih kecakapan dan keahlian mengenai teknologi dan informasi,
2. Menjaln kerja sama dengan perusahaan jaringan untuk mendapatkan dukungan signal yang baik
3. Pengawasan sekolah harus menyeluruh terhadap kegiatan sekolah dan pelaksanaan kurikulum merdeka, sumber daya pengawas sekolah harus ditingkatkan dalam hal konsentrasi linearitas mata pelajarannya untuk mengakumulasi semua bidang studi di sekolah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baruta, Y. (2023). *Assesmen Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka Pendidikan Anak Usia dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*. Lombok Tengah, NTB: Pusat Pengembangan dan Pendidikan Indonesia.
- bdk. Bohnert dan Klitzsch, 1. (2023). *Implementasi Kebijakan*. In M. d. Dr. Indra Kertati, *Implementasi Kebijakan Publik : Dari Hulu ke Hilir* (p. 5). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Berry David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dr. H. A. Rusdiana, MM and Drs. Nasihudin, M.Pd. (2017). *Peran Pimpinan PTKIS dalam implementasi Kurikulum KKNI menuju akuntabilitas PT*. Bandung.
- Dr. Indra Kertati, M. Si, dkk. (2023). *Impelementasi Kebijakan Publik (dari hulu ke hilir)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dr. syahrudin, S. M. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Murni, Veithzal Rivai dan Sylviana. (2021). *PERAN PIMPINAN PTKIS: Dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis KKNI Menuju Akuntabilitas PT*. Bandung: Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Kaufmann dan Rosewitz, 1. (2023). *Implementasi Kebijakan*. In M. d. Dr. Indra Kertati, *Implementasi Kebijakan Publik : Dari Hulu ke Hilir* (p. 5). Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Jurnal

- Akib, H. (2010). *Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana*. *Jurnal Adminstrasi Publik*,1(1),1–100.
<https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Hernita Ulfatihmah. (2020). *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*. In *Skripsi (Issue 201310200311137)*.

Manurung, R. R. B., Nst, I., & ... (2021). Peran Dinas Pendidikan Povinsi Sumatra Utara dalam Upaya Pengembangan Sekolah Luar Biasa Negeri Autis. ...
Jurnal Ilmiah Magister
<http://www.jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/743>

Pratikto, Y. D. (2002). Peran Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dalam Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Walikota dan Wakil Walikota. 7–12

Suyanto, B. (2013). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana, 389.
https://www.google.co.id/books/edition/Masalah_Sosial_Anak/zqRPDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Van Meter dan van Horn (Grindle, 1. 6. (2010). Apa Implementasi Kebijakan itu.
Jurnal Administrasi Publik, 2.

Yamin, M., S. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdeka (Telaah Metode Pembelajaran). Ju. Rnal Ilmiah Mandala Education, 6(1), 126

Skripsi

Hernita Ulfatihah. (2020). Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. In Skripsi (Issue 201310200311137).

Website Sumber Internet

2 Tugas Utama Dinas Pendidikan dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. (2022, Desember 16). Wartaguru.id. <https://wartaguru.id/2-tugas-utama-dinas-pendidikan-dalam-penerapan-Kurikulum-merdeka/>

Data Sekolah. (n.d.). [dapo.kemdikbud.go.id. \(https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/07000\)](https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/07000)

Dimas. (2022, Oktober 11). 149 Sekolah Negeri di Simalungun Terapkan Kurikulum Merdeka Tahun Depan. Parboaboa. <https://parboaboa.com/sekolah-negeri-di-simalungun-terapkan-Kurikulum-merdeka>

Fitri, D. (2022, Desember 31). Pertama dan Satu-Satunya di Indonesia, Kabupaten Paser Telah Menerapkan 100 Persen Kurikulum Merdeka. [humas.paserkab.go.id.\(https://humas.paserkab.go.id/berita/pertama-dan-](https://humas.paserkab.go.id/berita/pertama-dan-)

[satu-satunya-di-indonesia-kabupaten-paser-telah-menerapkan-100-persen-Kurikulum-merdeka](#)

Juniardi, W. (2023, Januari 8). Pembahasan Kurikulum Merdeka Belajar SMP Lengkap dengan Struktur dan Alokasi Tanggal. Quipper Blog. <https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/Kurikulum-merdeka-belajar-smp/>

Kupas Singkat Mengenai Kurikulum Merdeka. (2022, Juli 27). Guru Inovatif. <https://www.guruinovatif.id/@redaksiguruinovatif/kupas-singkat-mengenai-Kurikulum-merdeka>

Kurikulum Merdeka. (2023, Oktober 02). Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Merdeka

Perbedaan Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, Dan Mandiri Berbagi. (2023, Februari 08). smpnsatukurun.sch.id. <https://smpnsatukurun.sch.id/read/59/perbedaan-mandiri-belajar-mandiriberubah-dan-mandiri-berbagi>

Silmi Nurul Utami dan Serafica Gischa. (2023, Desember 20). Kurikulum: Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Komponennya. Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/02/101008069/Kurikulum-pengertian-fungsi-tujuan-dan-komponennya>

Sitoningrum, N. D. (2023, Juli 14). Kurikulum Merdeka Belajar: Pengertian, Tujuan, Karakteristik, hingga Keunggulannya. DetikSulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6823183/Kurikulum-merdeka-belajar-pengertian-tujuan-karakteristik-hingga-keunggulannya#:~:text=Mengutip%20laman%20Kementerian%20Pendidikan%2C%20Kebudayaan,mendalami%20konsep%20dan%20menguatkan%20kompetensi>

Peraturan Perundang-Undangan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, K. R. (2023). Permendikbudristek No. 262/M/2022. Jakarta: SURAT EDARAN NOMOR 0574/H.H3/SK.02.01/2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Observasi

PERAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA SMP NEGERI 1 SIANTAR

1. Identitas Observasi

- a. Lembaga yang diamati
- b. Lokasi
- c. Hari dan tanggal

2. Aspek yang diamati

- a. Meninjau langsung lokasi penelitian, serta keadaan sekitar lokasi SMP Negeri 1 Siantar dan Dinas Pendidikan Kabupatn Simalungun
- b. Mengamati proses pembelajaran pada SMP Negeri 1 Siantar terhadap Kurikulum Merdeka
- c. Mengamati setiap kegiatan/program yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar

3. Lembar Observasi

No.	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Implementasi Kurikulum Merdeka			
2.	Peran Dinas Pendidikan			
3.	Hambatan dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka			

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

PERAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA SMP NEGERI 1 SIANTAR

Identitas responden I (informan kunci)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Jabatan :
3. Hari dan tanggal :

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagai suatu kebijakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana peranan atau tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada SMP Negeri 1 Siantar.
2. Apakah sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Simalungun saat ini sudah mampu untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar?
3. Apakah Dinas Pendidikan ada memberikan bantuan pendanaan dan fasilitas belajar pada sekolah yang ada di Kabupaten Simalungun dalam mendukung penerapan Kurikulum Merdeka Belajar?.
4. Apa kendala yang dihadapi sekolah di Kabupaten Simalungun dalam penerapan kurikulum merdeka?

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagai strategi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana Strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan program Kurikulum Merdeka Belajar ini?
2. Bagaimana dinas pendidikan memastikan bahwa Kurikulum Merdeka Belajar tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi juga terintegrasi dengan praktik pembelajaran sehari-hari di sekolah?

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagai komunikasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Hal apa yg bisa dilakukan untuk mendukung setiap sekolah dalam pengimplementasian kurikulum merdeka? Apakah dinas pendidikan memiliki rencana komunikasi khusus ?
2. Bagaimana dinas pendidikan menjalankan informasi atau penyuluhan ttg prinsip-prinsip manfaat kurikulum merdeka di sekolah?

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagai alat penyelesaian sengketa dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana dinas pendidikan mengakomodir segala masukan atau usulan dalam proses perubahan kurikulum ini?
2. Bagaimana upaya Peran Dinas Pendidikan dalam Menyelesaikan pertentangan tentang Kurikulum saat ini?
3. Apakah dinas pendidikan memberikan pelatihan atau bimbingan kepada staf terkait untuk menjadi mediator atau fasilitator dalam penyelesaian sengketa Kurikulum Merdeka Belajar?

Identitas responden II (informan Utama)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Jabatan :
3. Hari dan tanggal :

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagai suatu kebijakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Apakah sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Simalungun saat ini sudah mampu untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar?.
2. Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh dinas pendidikan dalam merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di tingkat daerah?

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagai strategi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar Pada sekolah tingkat SMP di Kabupaten Simalungun?.
2. Menurut pandangan Bapak, apakah kebijakan kurikulum merdeka ini sudah berjalan merata ke setiap sekolah-sekolah

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagai komunikasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Kendala yang dihadapi sekolah di Kabupaten Simalungun penerapan kurikulum Merdeka Belajar?.

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagai alat penyelesaian sengketa dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana dinas pendidikan memberikan dukungan komunikasi kepada guru dan kepala sekolah dalam mengatasi kebingungan dan ketidakpastian terkait kurikulum merdeka ?
2. Apakah kurikulum muatan lokal bagi tingkatan smp masih diterapkan hingga saat ini?

Identitas responden III (informan Utama)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Jabatan :
3. Hari dan tanggal :

Peran sebagai suatu kebijakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka belajar pengelompokan materi esensial yang disusun guru guna mempermudah pembelajaran peserta didik sesuai dengan kebutuhannya?.
2. Apa Kebijakan bapak untuk mendukung kurikulum
3. Apakah ada kebijakan khusus yg diterapkan utk mendukung staf guru dlm mengatasi tantangan atau hambatan

Peran sebagai strategi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka belajar dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya?.
2. Bentuk dukungan yg diberikan pemerintah kepada kepala sekolah dan guru dalam implementasi prinsip-prinsip merdeka belajar
3. Sejauh mna bapak terlibat dalam proses dan perancangan strategi Implementasi Kurikulum Merdeka

Peran sebagai komunikasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana pendapat bapak dan ibu tentang fleksibilitas pemilihan mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler?.
2. Apakah ada pertemuan rutin antara guru, ortua tentang implementasi kurikulum merdeka?

Peran Kepala sebagai alat penyelesaian sengketa dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Sejauh mana bapak merasa terlibat terlibat dalam menangani konflik atau ketidaksepakatan antara staf guru dan siswa?

Identitas responden IV (informan pendukung)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Jabatan :
3. Hari dan tanggal :

Peran Guru sebagai suatu kebijakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana pandangan ibu terkait dengan konsep kemandirian dalam belajar?.
2. Apakah dinas pendidikan memberikan sumber daya atau dukungan tambahan untuk membantu guru dalam mengemban kreativitas ?
3. Bagaimana pendapat ibu tentang fleksibilitas pemilihan mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler?.

Peran Guru sebagai strategi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Menurut ibu, apakah strategi dalam penerapan kurikulum memberikan dampak positif?
2. Bagaimana peran ibu dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka ini?

Peran Guru sebagai komunikasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana ibu memotivasi siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran kurikulum ini?
2. Bagaimana cara ibu menilai respon siswa terhadap strategi pembelajaran yang ada?

Peran Guru sebagai alat penyelesaian sengketa dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. bagaimana peran ibu dalam penyelesaian sengketa yang timbul terkait implementasi kurikulum merdeka ini?
2. apa langkah-langkah yang dapat ibu ambil sebagai guru jika terjadi ketidaksepakatan terkait pelaksanaan implementasi kurikulum ini bu?

Identitas responden V (informan pendukung)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Jabatan :
3. Hari dan tanggal :

Peran Guru sebagai suatu kebijakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana pandangan bapak atau ibu terkait dengan konsep kemandirian dalam belajar?.
2. Apa aspek utama yang dapat membentuk meningkatkan Implementasi Kurikulum Merdeka?
3. Bagaimana pendapat bapak dan ibu tentang fleksibilitas pemilihan mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler?.

Peran Guru sebagai strategi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Apa ada dukung kongkret pada guru dalam pengimplementasian kurikulum merdeka?
2. Apakah dinas pendidikan memberikan sumber daya atau dukungan tambahan untuk membantu guru dalam mengemban kreativitas ?

Peran Guru sebagai komunikasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana peran Bapak dalam implementasi kurikulum?
2. Bagaimana Bapak memotivasi siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran kurikulum ini?

Peran Guru sebagai alat penyelesaian sengketa dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. bagaimana peran Bapak dalam penyelesaian sengketa yang timbul terkait implementasi kurikulum merdeka ini?
2. apa langkah-langkah yang dapat Bapak ambil sebagai guru jika terjadi ketidaksepakatan terkait pelaksanaan implementasi kurikulum ini bu?

Identitas responden VI (informan pendukung)

1. Nama :

2. Jenis kelamin :

3. Jabatan :

3. Hari dan tanggal :

Peran sebagai suatu kebijakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana sistem pembelajaran sekarang menurut kamu saat ini ?.

2. Apa pemahaman Anda tentang Konsep Kurikulum Merdeka Belajar, dan apakah Anda merasa tertarik untuk mencoba pengalaman belajar dengan pendekatan ini?

Peran sebagai strategi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan konsep kemandirian dalam belajar? Apakah Anda merasa siap untuk mengambil peran lebih besar dalam pengaturan dan penentuan jalannya pembelajaran?

2. Apa menurut kamu sistem belajar sambil bermain itu baik ?.

Peran sebagai komunikasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Apakah Anda memiliki ide atau harapan khusus terkait dengan jenis pembelajaran yang Anda inginkan, dan bagaimana Anda berharap Kurikulum Merdeka Belajar dapat memenuhi kebutuhan atau ekspektasi Anda?

Peran sebagai alat penyelesaian sengketa dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

Identitas responden VII (informan Utama)

1. Nama :

2. Jenis kelamin :

3. Jabatan :

3. Hari dan tanggal :

Peran sebagai suatu kebijakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana Anda sebagai siswa dapat memastikan bahwa kebijakan dan aturan yang diterapkan di sekolah mendukung prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar?
2. Bagaimana Anda sebagai siswa dapat menjadi agen perubahan positif dalam mempromosikan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar di kalangan teman-teman Anda?

Peran sebagai strategi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Menurut Anda, apa strategi konkrit yang dapat diambil oleh siswa untuk mendukung prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar, seperti kemandirian dan fleksibilitas?
2. Apakah Anda telah mencoba strategi pembelajaran yang berbeda atau kreatif dalam konteks Kurikulum Merdeka Belajar, dan bagaimana strategi tersebut memengaruhi pengalaman belajar Anda?
3. Apakah Anda merasa bahwa strategi keterlibatan siswa, seperti forum diskusi atau kelompok studi, dapat meningkatkan kolaborasi dan interaksi di kelas dalam konteks Kurikulum Merdeka Belajar?

Peran sebagai komunikasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Sejauh mana Anda merasa memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat atau masukan terkait dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP ini?

Identitas responden VIII (informan Utama)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Jabatan :
3. Hari dan tanggal :

Peran sebagai suatu kebijakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Bagaimana pandangan bapak atau ibu terkait dengan konsep kemandirian dalam belajar?.

2. Bagaimana Anda sebagai siswa dapat memastikan bahwa kebijakan dan aturan yang diterapkan di sekolah mendukung prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar?
3. Bagaimana Anda sebagai siswa dapat menjadi agen perubahan positif dalam mempromosikan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar di kalangan teman-teman Anda?

Peran sebagai strategi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Menurut Anda, apa strategi konkrit yang dapat diambil oleh siswa untuk mendukung prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar, seperti kemandirian dan fleksibilitas?
2. Apakah Anda telah mencoba strategi pembelajaran yang berbeda atau kreatif dalam konteks Kurikulum Merdeka Belajar, dan bagaimana strategi tersebut memengaruhi pengalaman belajar Anda?
3. Apakah Anda merasa bahwa strategi keterlibatan siswa, seperti forum diskusi atau kelompok studi, dapat meningkatkan kolaborasi dan interaksi di kelas dalam konteks Kurikulum Merdeka Belajar?

Peran sebagai komunikasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Pada SMP Negeri 1 Siantar

1. Sejauh mana Anda merasa memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat atau masukan terkait dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP ini?

Lampiran 3 : Hasil Observasi

PERAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA SMP NEGERI 1 SIANTAR

1. Identitas Observasi

- a. Lembaga yang diamati : Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 - b. Lokasi : Bahopal Raya, Kec. Raya, Kabupaten Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
 - c. Hari dan tanggal : Senin, 05 Februari 2024
-
- a. Lembaga yang diamati : Sekolah SMP Negeri 1 Siantar Kabupaten Simalungun

- b. Lokasi : Jln. Mahoni Raya No. 06 Perumnas Batu Vi,
SITALASARI, Kec. Siantar, Kab. Simalungun,
Sumatera Utara, dengan kode pos 21151.
- c. Hari dan tanggal : Senin, 27 Februari 2024

2. Aspek yang diamati

- Meninjau langsung lokasi penelitian, serta keadaan sekitar lokasi SMP Negeri 1 Siantar dan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
- Mengamati proses pembelajaran pada SMP Negeri 1 Siantar terhadap Kurikulum Merdeka
- Mengamati setiap kegiatan/program yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar

3. Lembar Observasi

No.	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Implementasi Kurikulum Merdeka	✓		Pengimplementasian Kurikulum Merdeka yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan sudah cukup.
2.	Peran Dinas Pendidikan	✓		Peran Dinas Pendidikan sebagai media pendukung terhadap pengimplemntasian kurikulum merdek ini sudah baik
3.	Hambatan dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka	✓		Memang masih adanya hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka ini tetapi untuk sekrang sudah berjalan cukup baik

Lampiran 4 : Deskripsi Hasil Wawancara

PERAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA SMP NEGERI 1 SIANTAR

Identitas responden 1 (informan Kunci)

- Nama Responden : Sudiahman Saragih, SH
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
- Tanggal : 05 Februari 2024

1. Bagaimana peranan atau tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada SMP Negeri 1 Siantar.

Jawab:

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada seluruh Sekolah Menengah Pertama termasuk salah satunya SMP Negeri 1 Siantar peranan Dinas Pendidikan memang sangat besar. Dimana salah satunya yaitu melakukan koordinasi dan pengawasan serta memberikan penyuluhan dan menyediakan fasilitas pendukung seperlunya yang memang dibutuhkan sesuai dengan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar tersebut.

2. Apakah sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Simalungun saat ini sudah mampu untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar?

Jawab:

Pada dasarnya dilihat dari kemampuan sekolah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar ini memang sudah mampu bila difasilitasi perangkat yang cukup. Apalagi kita mengetahui kalau zaman sekarang ini anak-anak sudah sangat canggih dalam menggunakan handphone android yang juga dapat dijadikan sebagai fasilitasnya. Tinggal lagi kita selaku pengelola pendidikan yang harus tanggap dan sigap memberikan penyuluhan dan pengetahuan khusus kepada mereka agar dapat mengaksesnya. Berkaitan dengan susahnyanya sinyal di daerah pelosok, maka kita akan bekerjasama dengan pemerintah berkaitan dengan hal ini. Apabila semua pihak ikut mendukung, maka saya optimis Kurikulum Merdeka Belajar tersebut akan dapat diterapkan dengan baik.

3. Apakah Dinas Pendidikan ada memberikan bantuan pendanaan dan fasilitas belajar pada sekolah yang ada di Kabupaten Simalungun dalam mendukung penerapan Kurikulum Merdeka Belajar?.

Jawab:

Dinas Pendidikan memang memberikan bantuan pendanaan dan fasilitas belajar pada sekolah yang ada di Kabupaten Simalungun, namun hanya terbatas pada dana yang ditetapkan pihak kantor kementerian saja. Sedangkan fasilitas yang diberikan sesuai dengan apa yang dianjurkan dan disediakan oleh kementerian pendidikan berupa laptop atau notebook serta perangkat lunak lainnya yang memang dibutuhkan untuk penerapan Kurikulum Merdeka Belajar

4. Apa kendala yang dihadapi sekolah di Kabupaten Simalungun dalam penerapan Kurikulum Merdeka?

Jawab:

Banyak memang kendala yang dihadapi berkaitan penerapan Kurikulum Merdeka ini, diantaranya fasilitas yang memang sangat minim bahkan ada yang tidak memiliki fasilitas sama sekali untuk penerapannya dikarenakan sistem yang dipakai secara online. Masih banyak sekolah yang ada di daerah pelosok Kabupaten Simalungun yang bahkan sinyal saja sangat susah untuk didapat, sehingga tidak bisa online sama sekali. Selain itu tenaga pengajar yang ada masih belum sepenuhnya mengerti tentang menggunakan komputer, karena kan rata-rata tenaga pengajarnya sudah tua yang memang bisa dibilang termasuk galte lah gitu, tidak mengerti menggunakan komputer. Jadi ya memang harus mendatangkan tenaga pendidik pembantu untuk mengajari mereka dan memang membutuhkan Tanggal yang cukup lama, begitu.

5. Bagaimana Strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan program Kurikulum Merdeka Belajar ini?

Jawab :

Strategi melaksanakan sosialisasi, raodsow, kemudian laporan melalui platform dan juga implementasi hasil kurikulum mendekat itu melalui laporan yang kita By sekolah kemudian dilaporkan ke dinas

6. Bagaimana dinas pendidikan memastikan bahwa Kurikulum Merdeka Belajar tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi juga terintegrasi dengan praktik pembelajaran sehari-hari di sekolah?

Jawab :

Dinas pendidikan memiliki Korwil di setiap Kecamatan, jadi seluruh satuan pendidik ini melaporkan ke korwil kemudian korwil ini kita panggil sejauh mana kurikulum merdeka di wilayah kerjaan mereka masing masing. Nah laporan itu yg kita lihat dan kita evaluasi dan kita koordinasikan dan kita intregasikan agas bisa sejalan dengan dinas sesuai dengan apa tujuan kita.

7. Hal apa yg bisa dilakukan untuk mendukung setiap sekolah dalam pengimplementasian kurikulum merdeka? Apakah dinas pendidikan memiliki rencana komunikasi khusus ?

Jawab :

Kita sampaikan melalui grup wa, melalui rapat-rapat, kemudian di setiap event kita tetap menghayo-hayokan kurikulum merdeka

8. Bagaimana dinas pendidikan menjalankan informasi atau penyuluhan ttg prinsip-prinsip manfaat kurikulum merdeka di sekolah?

Jawab :

Hanya lihat aja buka Google semua sudah paham, kita himbau untuk lihat ke Google bahkan rapat juga kita lakukan dengan zoom sehingga informasi cepat sampai.

9. Bagaimana dinas pendidikan mengakomodir segala masukan atau usulan dalam proses perubahan kurikulum ini?

Jawab :

Jadi kita itu ada laporan atau rapat bulanan. Yang diundang itu adalah korwil, korwil ini akan menyampaikan laporannya, kemudian ada lagi korwil perpanjangan dinas kemudian setiap bulan juga ada rapat k3s. k3s adalah satu wadah atau lembaga kumpulan kepala sekolah Sd kemudian di smp ada Mk2s. Nah di rapat bulanan itulah di sampaikan kendala-kendala ataupun masukan kinerja setiap satuan pendidikan

10. Bagaimana upaya Peran Dinas Pendidikan dalam Menyelesaikan pertentangan tentang Kurikulum saat ini?

Jawab :

Upaya nya dengan melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan dan menyelesaikan pertentangan dengan menjelaskan kurikulum merdeka itu seperti apa. jadi tidak ada di kurikulum merdeka itu penekanan tetapi sesuai dengan amanah daripada pemerintah dan undang-undang yang memang benar dilaksanakan dengan baik

11. Apakah dinas pendidikan memberikan pelatihan atau bimbingan kepada staf terkait untuk menjadi mediator atau fasilitator dalam penyelesaian sengketa Kurikulum Merdeka Belajar?

Jawab :

Dinas Pendidikan melaksanakan bimbingan teknologi ataupun pembekalan kepada pengawas ditingkat kecamatan jadi mereka itu

menjadi fasilitator perpanjangan dinas dan juga beserta korwil untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan.

Identitas responden 2 (informan Utama)

Nama Responden : Ibu Purba
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kabid Dinas Pendidikan Kurikulum
Tanggal : 06 Februari 2024

1. Apakah sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Simalungun saat ini sudah mampu untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar?.

Jawab:

Perencanaan diawali dengan tahap penetapan Tujuan Pembelajaran (TP) berdasarkan rumusan Capaian Belajar (CP). Selanjutnya membuat acuan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi dan disusun secara sistematis. Modul pendidikan selanjutnya ditentukan atau disusun dan direvisi serta dikembangkan oleh lembaga SMP Negeri 1 Siantar.

2. Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh dinas pendidikan dalam merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di tingkat daerah?

Jawab :

Mengadakan trobosan untuk men sukseskan kurikulum merdeka di 2024, baru-baru ini kadis n kabid turun ke lapangan di tiga titik dan dikumpulkan dri bbrp Kecamatan yakni kepala sekolah SD, SMP, baik itu swasta dan negeri dan juga TK PAUD dan korwil sbg perpanjangan dinas dan juga pengawas, kita keliling satuan pendidikan menyampaikan agar seluruh satuan pendidikan harus melaksanakan kurikulum merdeka thn 2024. Kemudian langkah kedua, sebelumnya tahun 2023 telah melaksakan sosialisasi bagi kepala sekolah swasta dan negeri untuk melaksanakan kurikulum mendeka, walau di tahun ini belum menyeluruh ttpi 2024 mau tidak mau hrus kurikulum merdeka. Selanjutnya di tahun ini kita mengambil kebijakan akan melaksanakan bimtek tingkatan kapasitas khusus teknologi kurikulum merdeka

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Pada sekolah tingkat SMP di Kabupaten Simalungun?.

Jawab:

Hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam penerapan Kurikulum Merdeka ini sangat banyak, dari 810 sekolah SD dan SMP di Kabupaten Simalungun terutama yang di pelosok-pelosok belum memiliki kelengkapan fasilitas perangkat lunak pendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka seperti Laptop, selain itu di daerah yang agak terpelosok seperti daerah daerah Haranggaol, misalnya daerah Purba Pasir dan sekitarnya itu sering sekali sinyal agak lemah bahkan tidak dapat sinyal sama sekali. Hal ini tentunya menyebabkan tidak dapat diterapkannya Kurikulum Merdeka, kita ketahui kan bahwa Kurikulum Merdeka penerapannya sudah by aplikasi.

4. Menurut pandangan ibu, apakah kebijakan kurikulum merdeka ini sudah berjalan merata ke setiap sekolah-sekolah

Jawab :

Sudah berjalan merata di sekolah untuk di kabupaten Simalungun tetapi belum sepenuhnya 100% tapi seluruh satuan pendidikan sudah memahami dan mengetahui kebijakan ataupun kurikulum merdeka yang harus dilaksanakan 2024 khusus kabupaten Simalungun.

5. Kendala yang dihadapi sekolah di Kabupaten Simalungun penerapan Kurikulum Merdeka Belajar?.

Jawab:

Selain itu masalah yang paling penting juga penentu terlaksananya Kurikulum Merdeka ini yaitu tersedianya guru-guru yang mampu dan mengetahui betul tentang aplikasi Kurikulum Merdeka ini. Hal ini juga yang kami sarankan kepada dinas pendidikan pusat agar dilakukan berbagai seminar, penyuluhan atau pendidikan dan pelatihan terhadap guru-guru agar mampu mengaplikasikan Kurikulum Merdeka ini dengan baik

6. Bagaimana dinas pendidikan memberikan dukungan komunikasi kepada guru dan kepala sekolah dalam mengatasi kebingungan dan ketidakpastian terkait kurikulum merdeka ?

Jawab :

Langsung turun kelapangan, pertama kita sampaikan kepada korwil, kepek, pengawas, tahapan kurikulum merdeka dimana satuan pendidikan di seluruh harus menyediakan yang pertama perangkat bahan untuk melaksanakan kurikulum merdeka seperti laptop. Kemudian setiap guru masuk dengan Id belajar kemudian masuk dan mengunggah

kegiatannya selanjutnya harus melaksanakan satuan pendidik assesment terhadap anak-anak ataupun peserta didik untuk mengetahui kemampuan ataupun potensi yang dimiliki anak didik. Dilihat dari assesment jika dia lebih ke assesment satu maka kita kembangkan dan ke assesment lain tetap diikuti tapi tidak koma haruskan.

7. Apakah kurikulum muatan lokal bagi tingkatan smp masih diterapkan hingga saat ini?

Jawab :

muatan lokal sedang kita godok dan tahun ini semoga secara kurikulum bisa terlaksana, namun muatan lokal ini sudah ada sebelumnya sudah ada di kabupaten simalungun

Identitas responden 3 (informan Utama)

Nama Responden : Jesli Silitonga
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Wakil Bidang Kurikulum SMP Negeri 1 Siantar
Tanggal : 27 Februari 2024

1. Bagaimana pelaksanaan Kurikulum Merdeka belajar pengelompokan materi esensial yang disusun guru guna mempermudah pembelajaran peserta didik sesuai dengan kebutuhannya?.

Jawab:

Pengelompokan materi esensial yang disusun guru guna mempermudah pembelajaran peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Dilanjut dengan penyusunan strategi pembelajaran diferensiasi, pembelajaran diferensiasi terbagi menjadi tiga, yang pertama, diferensiasi kontensi yang berkaitan dengan kurikulum dan materi yang dipelajari peserta didik dengan memetakan kebutuhan belajar dan menggunakan pengelompokan berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Kedua, diferensiasi proses yaitu terkait bagaimana cara yang dilakukan peserta didik dalam mengolah ide dan informasi. Ketiga diferensiasi produk merupakan wujud hasil dari apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Produk pembelajaran ini dapat menjadi penentu bagi guru untuk menilai tingkat pemahaman peserta didik dan menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan materi berikutnya. Terakhir diferensiasi lingkungan belajar, terkait bagaimana cara siswa bekerja dan kenyamanan dalam pembelajaran

2. Apa Kebijakan bapak untuk mendukung kurikulum

Jawab :

kita slalu mendukung sluru kopetensi guru guru dalam mengikuti seluruh kegiatan2 yang berhubungan dengan implementasi kurikulum merdeka (IKM) melalui PMM dan lain sebagainya

3. Apakah ada kebijakan khusus yg diterapkan utk mendukung staf guru dalam mengatasi tantangan atau hambatan

Jawab :

pasti ada. Kita memposisikan beberapa guru, seperti pake PKS , menjadi guru penggerak dan calon guru penggerak

4. Bagaimana pelaksanaan Kurikulum Merdeka belajar dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya?.

Jawab:

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka belajar itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya dimana dapat memilih setidaknya dua jenis keterampilan, memilih satu jenis keterampilan lebih berfokus pada siswa untuk mengeksplorasi seluruh keterampilan untuk menjadi lulusan yang siap kerja, sedangkan siswa kelas VII dapat memilih minimal dua jenis kompetensi dari 20 jenis kompetensi yang tersedia. Hasil belajar dapat ditentukan dengan menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Guru diberi kebebasan untuk menetapkan standar pencapaian tujuan pembelajaran, tergantung pada karakteristik kompetensi tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Selain itu, bisa melanjutkan ke kelas berikutnya tergantung pada pengumuman tingkat pencapaian tujuan pembelajaran.

5. Bentuk dukungan yg diberikan pemerintah kepada kepala sekolah dan guru dalam implementasi prinsip-prinsip merdeka belajar

Jawab :

ada, melaksanakan seminar seminar, pembekalan, diklat juga dinas mendukung sekolah penggerak dan guru penggerak

6. Sejauh mna bapak terlibat dalam proses dan perancangan strategi Implementasi Kurikulum Merdeka?

Jawab :

kita memimpin perencanaan dalam penyusunan implementasi sesuai dengan kurikulum merdeka.

7. Bagaimana pendapat bapak dan ibu tentang fleksibilitas pemilihan mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler?.

Jawab:

Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum mengacu pada gagasan merancang program pendidikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya kemampuan beradaptasi dan penyesuaian untuk memenuhi beragam kebutuhan siswa. Hal ini melibatkan penyediaan pilihan bagi siswa untuk dipilih, memungkinkan mereka untuk mengejar minat dan kekuatan mereka sambil juga mengakomodasi gaya dan kemampuan belajar yang berbeda. Fleksibilitas dalam kurikulum dapat mencakup pilihan mata kuliah pilihan, jalur pembelajaran yang dipersonalisasi, dan penggabungan beragam metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa

8. Apakah ada pertemuan rutin antara guru, ortua tentang implementasi kurikulum merdeka?

Jawab :

pasti, slalu menyebarkan info ke wa grup. Dan memastikan guru guru terhubung dengan PMM

9. Sejauh mana bapak merasa terlibat terlibat dlm menangani konflik atau ketidaksepakatan antara staf guru dan siswa?

Jawab :

Sebelum ada konflik, kami para pimpinan kami sudah ada workshop, pertemuan rutin, info wa grup, pertemuan rutin 1x dalam sebelum untuk membahas ikm.

Identitas responden 4 (informan Pendukung)

Nama Responden : Sarupah
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Guru SMP Negeri 1 Siantar
Tanggal : 27 Februari 2024

1. Bagaimana pandangan bapak atau ibu terkait dengan konsep kemandirian dalam belajar?.

Jawab:

Kurikulum Merdeka belajar merupakan sistem pembelajaran yang berkualitas dalam meningkatkan kemampuan sesuai dengan fasilitas yang ada. Dengan adanya pembelajaran mandiri, siswa bisa lebih teliti lagi dengan konsep pembelajaran yang sesuai dengan dia, dan tahu sampai mana kemampuannya dalam belajar mandiri. Karena dengan adanya pembelajaran mandiri, siswa siswa menjadi lebih kreatif dalam memilih metode pembelajaran. Harapan saya semoga dengan konsep merdeka belajar ini siswa siswi menjadi lebih peduli lagi terhadap pendidikan mereka masing masing.

2. Apakah dinas pendidikan memberikan sumber daya atau dukungan tambahan untuk membantu guru dalam mengemban kreativitas ?

Jawab :

Pelatihan dari guru guru yang ditunjuk dinas, kemudian dari webinar dari dinas pendidikan

3. Bagaimana pendapat ibu tentang fleksibilitas pemilihan mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler?.

Jawab :

Pembelajaran bukan hanya di dapat dari akademik, melainkan juga bisa di dapat dari non-akademik, dan menurut saya tidak ada hubungannya dalam meningkatkan motivasi belajar dibidang akademik. Menurut saya konsep kurikulum merdeka belajar adalah siswa menjadi lebih bebas berekspresi dalam pembelajaran yang dia pilih. Saya memiliki harapan agar pembelajaran jangan hanya terlalu monoton dengan buku, seperti kurikulum yg kini baru dilakukan oleh pemerintah yaitu kurikulum merdeka yg bukan hanya bergantung dengan buku tetapi bisa mengambil informasi dari berbagai sumber contohnya internet

4. Menurut ibu, apakah strategi dalam penerapan kurikulum memberikan dampak positif?

Jawab :

Sangat memberikan dampak positif, setiap kurikulum meskipun berkati pasti positif, tidak ada yang tidak positif hnya saja mungkin beda beda titik fokusnya. Dulu fokusnya tidak peserta didik tapi di ikm ini kita

sangat berfokus dengan apa yang menjadi bakat dan maunya anak. enggak sebatas kita harus menekan dia harus matematika, ips atau apapun. Tapi dia mau apa kita fasilitasi, tetapi tetap kita jadi sarana nya.

5. Bagaimana peran ibu dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka ini?

Jawab :

Kami sekarang lebih fleksibel, semakin dekat dengan siswa, kami juga belajar bagaimana siswa itu senang pada kita. Kita bisa tuntun mreka, kita kembangkan bakatnya dimana dia senang.

6. Bagaimana ibu memotivasi siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran kurikulum ini?

Jawab :

Yang pertama kita tidak boleh doktrin, dengan ikm ini kita mempelajari siswa ini gimna, kita harus bisa mengenali n mendekati diri kepada siswa menjadi org yg disenangi mreka Tapi tetap make role. Dan sekarang anak anak lebih suka mandiri, membiarkan mreka mengembangkan apa yg menjadi pola pikir mreka, tapi ada batasnya. Tidak semata mata terserah saja. dengan bimtek dan webinar, pelatihan pelatihan. Bahkan di sekolah ini sering di pake untuk penyuluhan untuk kurikulum merdeka. Terkait umpan balik, dinas itu leluasa memberikan sepenuhnya kepada kita. Namun dalam kolidor dalam komunikasi, kurangnya apa, baiknya gimana mreka terbuka juga.

7. Bagaimana cara ibu menilai respon siswa terhadap strategi pembelajaran yang ada?

Jawab :

Belajar ini tidak bisa satu arah, kita sering terkendala dengan latar belakang siswa kalau notaben nya broken, baiknya disini kalau dirumah beda lagi, atau sebaliknya. Nah itulah yang di lkm ini membentuk n membuat kalau bisa memahami kondisi anak.

8. Bagaimana peran ibu dalam penyelesaian sengketa yang timbul terkait implementasi kurikulum merdeka ini?

Jawab :

Peran saya contohnya seperti pada saat siswa berantam atau pada saat ini generasi yang sekarang generasi galau, sehingga guru harus punya strategi untuk membuat anak-anak itu bisa sedikit melupakan galau tersebut. karna kita ga tau apa masalahnya dirumah, terus sampe sekolah di ganggu oleh temannya sehingga dia bisa langsung emosi. jadi guru bersama dengan bk pelan-pelan menyelidiki siswa tersebut, ketika kita sudah tau maka kita sebagai guru menentukan strategi bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu.

9. Apa langkah-langkah yang dapat ibu ambil sebagai guru jika terjadi ketidaksepakatan terkait pelaksanaan implementasi kurikulum ini bu?

Jawab :

Kalau saya lebih cenderung mempelajari terlebih dahulu, setelah itu kalau ada baik nya saya kasih saran bila ada buruknya saya beritahu juga dan juga tidak terlepas dari musyawarah dengan berbicara baik-baik. kalau ada ketidaksepakatan mengenai implementasi kurikulum merdeka ini, kami para guru biasanya berembuk terutama sama kepala sekolah. ya menghadapi bagaimana upata Implementasi Kurikulum Merdeka ini berjalan dengan benar. jadi kalau peran saya ikut sebagai peserta dan ikut juga memberikan saran

Identitas responden 5 (informan Pendukung)

Nama Responden : Christoni Panjaitan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Guru SMP Negeri 1 Siantar
Tanggal : 28 Mei 2024

1. Bagaimana pandangan bapak atau ibu terkait dengan konsep kemandirian dalam belajar?.

Jawab:

Menurut saya konsep Kurikulum Merdeka belajar adalah siswa menjadi lebih bebas berekspresi dalam pembelajaran yang dia pilih. Konsep kemandirian belajar merupakan sistem pembelajaran yang siswa tersebut pilih, banyak metode pembelajaran yang bisa di pilih untuk

meningkatkan kualitas belajar. Harapan saya semoga dengan pembelajaran yang saya pilih bisa saya terapkan dengan baik.

2. Apa aspek utama yang dapat membentuk meningkatkan Implementasi Kurikulum Merdeka?

Jawab :

kurikulum identik yg berpusat pada murid. seperti sekarang murid bisa belajar dari aplikasi sosial media seperti tiktok youtube, jadi kita sebagai guru betul betul menyadari bahwa murid adalah pusat pendidikan itu

3. Bagaimana pendapat bapak dan ibu tentang fleksibilitas pemilihan mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler?.

Jawab :

Pembelajaran bukan hanya di dapat dari akademik, melainkan juga bisa di dapat dari non-akademik, dan menurut saya tidak ada hubungannya dalam meningkatkan motivasi belajar dibidang akademik. Menurut saya konsep Kurikulum Merdeka belajar adalah siswa menjadi lebih bebas berekspresi dalam pembelajaran yang dia pilih. Saya memiliki harapan agar pembelajaran jangan hanya terlalu monoton dengan buku, seperti kurikulum yg kini baru dilakukan oleh pemerintah yaitu Kurikulum Merdeka yg bukan hanya bergantung dengan buku tetapi bisa mengambil informasi dari berbagai sumber contohnya internet.

4. Apa ada dukung kongkret pada guru dalam pengimplementasian kurikulum merdeka?

Jawab :

dukungan dinas pasti ada, karna pada saat kurikulum baru itu dinas slli menganjurkan utk belajar, kedua pasti menyiapkan seperti narasumber narasumber utk datang ke sekolah sekolah untuk mensosialisasikan kurikulum merdeka

5. Apakah dinas pendidikan memberikan sumber daya atau dukungan tambahan untuk membantu guru dalam mengemban kreativitas ?

Jawab :

ada dukungan seperti narasumber untuk dukungan lainnya seperti informasi-informaasi

6. Bagaimana peran Bapak dalam implementasi kurikulum mrdeka ini?

Jawab :

- kalau kerekan guru, dulu terbiasa dengan sesuatu yang terpola. kalau sekarang kita di bebaskan yang penting point pentingnya ada di dalam. jadi peran saya memberi tahun yg terbaik dan terbaik

- kalau untuk murid, kita engga melulu kita yang ngomong. kadang bikin game, balajar di luar kelas jd fleksibel

7. Bagaimana Bapak memotivasi siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran kurikulum ini?

Jawab :

Mulai memotivasi dengan memberikan ruang kpada siswa untuk memberikan pendapat

8. Bagaimana peran ibu dalam penyelesaian sengketa yang timbul terkait implementasi kurikum merdeka ini?

Jawab :

Menurut saya kalau penerapan Kurikulum Merdeka ini tidak terlalu banyak permasalahan nya, paling masalahnya pada penggunaan teknologi.

9. Apa langkah-langkah yang dapat ibu ambil sebagai guru jika terjadi ketidaksepakatan terkait pelaksanaan implementasi kurikulum ini bu?

Jawab :

Menurut saya, biasanya kami berdiskusi dengan guru-guru yang lain. seperti kemarin, kepala sekolah membuat semacam pelatihan-pelatihan. kami yang menjadi guru penggerak dijadikan sebagai narasumber nya

Identitas responden 6 (informan Pendukung)

Nama Responden : Dina Lorecia Manurung
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Siswi SMP Negeri 1 Siantar
Tanggal : 28 Mei 2024

1. Bagaimana sistem pembelajaran sekarang menurut kamu saat ini ?.

Jawab:

Menurut saya prinsip-prinsip kurikulum merdeka belajar yg diterapkan oleh Sekolah sangat baik dan Guru mampu menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan sebagai salah satu karakteristik merdeka belajar. banyak hal yang bisa dilakukan agar pembelajaran tidak membosankan dan agar siswa tidak mudah jenuh akan pembelajaran tersebut dan Dalam sistem pembelajaran sekarang sangat memuaskan, ketika kita tidak mengerti pembelajaran yang dilakukan bisa langsung ditanyakan kepada guru. Jadi menurut saya, kami bebas memberi saran tentang metode pembelajaran kami.

2. Apa menurut kamu sistem belajar sambil bermain itu baik ?.

Jawab:

Yaa, dengan bermain dan belajar siswa dapat memunculkan ide yang baik dalam pembelajaran, sehingga siswa menjadi lebih fokus lagi dan teliti dalam berkarya. Menurut saya, dengan belajar sambil bermain merupakan suatu hal yang baik jika diterapkan dalam pembelajaran sehingga siswa siswi tidak bosan dengan pembelajaran yang terlalu monoton.

3. Apa pemahaman Anda tentang Konsep Kurikulum Merdeka Belajar, dan apakah Anda merasa tertarik untuk mencoba pengalaman belajar dengan pendekatan ini?

Jawab :

konsep kemandirian belajar merupakan sistem pembelajaran yang siswa tersebut pilih, banyak metode pembelajaran yang bisa di pilih untuk meningkatkan kualitas belajar.

4. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan konsep kemandirian dalam belajar? Apakah Anda merasa siap untuk mengambil peran lebih besar dalam pengaturan dan penentuan jalannya pembelajaran?

Jawab :

menurut saya konsep kurikulum merdeka belajar adalah siswa menjadi lebih bebas berekspresi dalam pembelajaran yang dia pilih. dengan adanya pembelajaran mandiri, siswa siswa menjadi lebih kreatif dalam memilih metode pembelajaran.

5. Apakah Anda memiliki ide atau harapan khusus terkait dengan jenis pembelajaran yang Anda inginkan, dan bagaimana Anda berharap Kurikulum Merdeka Belajar dapat memenuhi kebutuhan atau ekspektasi Anda?

Jawab :

harapan saya semoga dengan pembelajaran yang saya pilih bisa saya terapkan dengan baik dan semoga dengan konsep merdeka belajar ini siswa siswi menjadi lebih peduli lagi terhadap pendidikan mereka masing masing.

Identitas responden 7 (informan Pendukung)

Nama Responden : Tiurma
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Siswi SMP Negeri 1 Siantar
Tanggal : 28 Mei 2024

1. Bagaimana Anda sebagai siswa dapat memastikan bahwa kebijakan dan aturan yang diterapkan di sekolah mendukung prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar?

2.

Jawab :

Kurikulum merdeka belajar yg diterapkan oleh Sekolah sangat baik Dan Guru mampu menciptakan pembelajara yang tidak membosankan Sebagai salah satu Karakteristik merdeka Belajar.

3. Bagaimana Anda sebagai siswa dapat menjadi agen perubahan positif dalam mempromosikan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar di kalangan teman-teman Anda?

Jawab :

Dalam prinsip saya mempromosi kan prinsip-prinsip kurikulum merdeka belajar ke teman-teman saya, dengan melakukan atau mengajak teman saya untuk selalu menggigat profil pelajar Pancasila dan selalu mengingatkan mereka untuk selalu mempercayai guru yg masuk ke dalam Kelas.

4. Menurut Anda, apa strategi konkrit yang dapat diambil oleh siswa untuk mendukung prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar, seperti kemandirian dan fleksibilitas?

Jawab :

Menurut saya, banyak hal yang bisa dilakukan agar pembelajaran tidak membosankan dan agar siswa tidak mudah jenuh akan pembelajaran tersebut

5. Apakah Anda telah mencoba strategi pembelajaran yang berbeda atau kreatif dalam konteks Kurikulum Merdeka Belajar, dan bagaimana strategi tersebut memengaruhi pengalaman belajar Anda?

Jawab :

yaa, siswa menjadi lebih fokus lagi dan teliti dalam berkarya

6. Apakah Anda merasa bahwa strategi keterlibatan siswa, seperti forum diskusi atau kelompok studi, dapat meningkatkan kolaborasi dan interaksi di kelas dalam konteks Kurikulum Merdeka Belajar?

Jawab :

tentu saja iyaa, karena bisa saling sharing ilmu dan memperluas pengetahuan sekaligus lebih mengenal teman satu sama lain

7. Sejauh mana Anda merasa memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat atau masukan terkait dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP ini?

Jawab :

menurut saya, kami bebas memberi saran tentang metode pembelajaran kami

Identitas responden 8 (informan Pendukung)

Nama Responden : Windi
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Siswi SMP Negeri 1 Siantar
Tanggal : 28 Mei 2024

1. Bagaimana Anda sebagai siswa dapat memastikan bahwa kebijakan dan aturan yang diterapkan di sekolah mendukung prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar?

Jawab :

dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan tersebut juga sudah mendukung prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar tersebut

2. Bagaimana Anda sebagai siswa dapat menjadi agen perubahan positif dalam mempromosikan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar di kalangan teman-teman Anda?

Jawab :

dengan melakukan nya ke diri sendiri terlebih dahulu dan membantu teman saya untuk mengikuti kegiatan positif dalam belajar

3. Menurut Anda, apa strategi konkrit yang dapat diambil oleh siswa untuk mendukung prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar, seperti kemandirian dan fleksibilitas?

Jawab :

Dalam sistem pembelajaran sekarang sangat memuaskan, ketika kita tidak mengerti pembelajaran yang dilakukan bisa langsung ditanyakan kepada guru

4. Apakah Anda telah mencoba strategi pembelajaran yang berbeda atau kreatif dalam konteks Kurikulum Merdeka Belajar, dan bagaimana strategi tersebut memengaruhi pengalaman belajar Anda?

Jawab :

5. Apakah Anda merasa bahwa strategi keterlibatan siswa, seperti forum diskusi atau kelompok studi, dapat meningkatkan kolaborasi dan interaksi di kelas dalam konteks Kurikulum Merdeka Belajar?

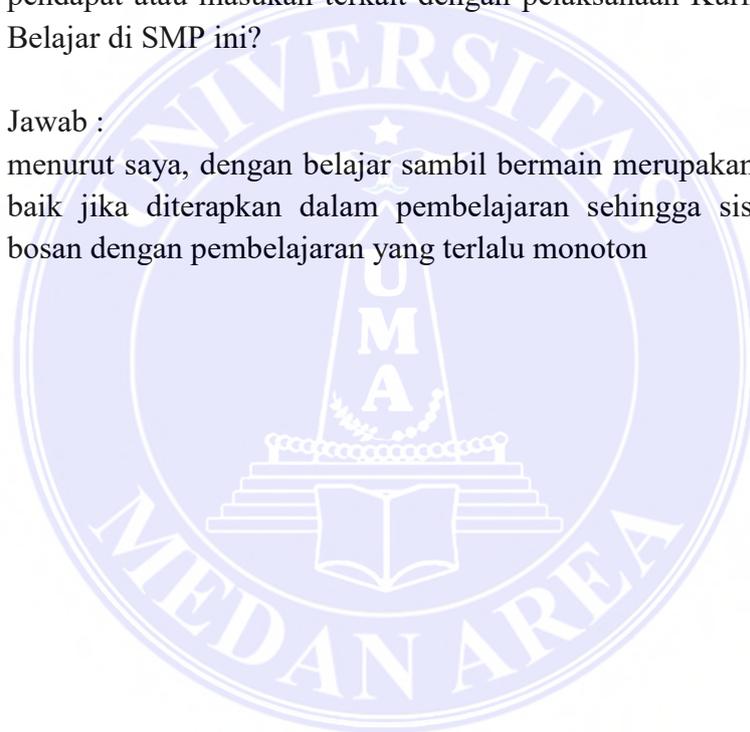
Jawab :

dengan mengadakan sesi tanya jawab, dan mengulang materi ketika tidak dimengerti

6. Sejauh mana Anda merasa memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat atau masukan terkait dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP ini?

Jawab :

menurut saya, dengan belajar sambil bermain merupakan suatu hal yang baik jika diterapkan dalam pembelajaran sehingga siswa siswi tidak bosan dengan pembelajaran yang terlalu monoton



Lampiran 5 : Surat Izin *Research* dan Surat Selesai *Research*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 169/FIS.2/01.7/U/2024 Medan, 22 Januari 2024
Lampiran. : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Putri Aulia Hasanah Pane
NIM : 208520072
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

“ Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada SMP Negeri 1 Siantar Kabupaten Simalungun ”

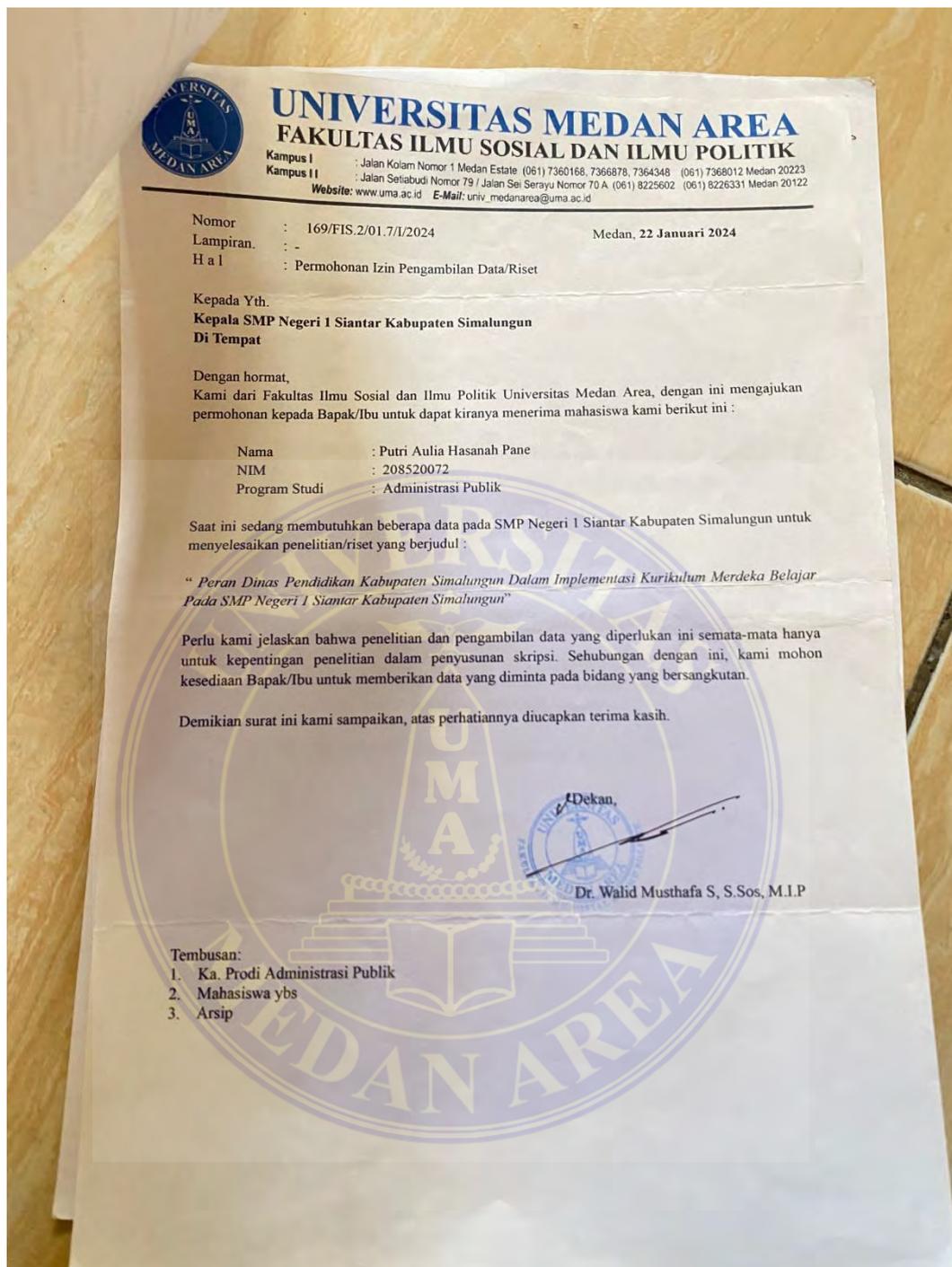
Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

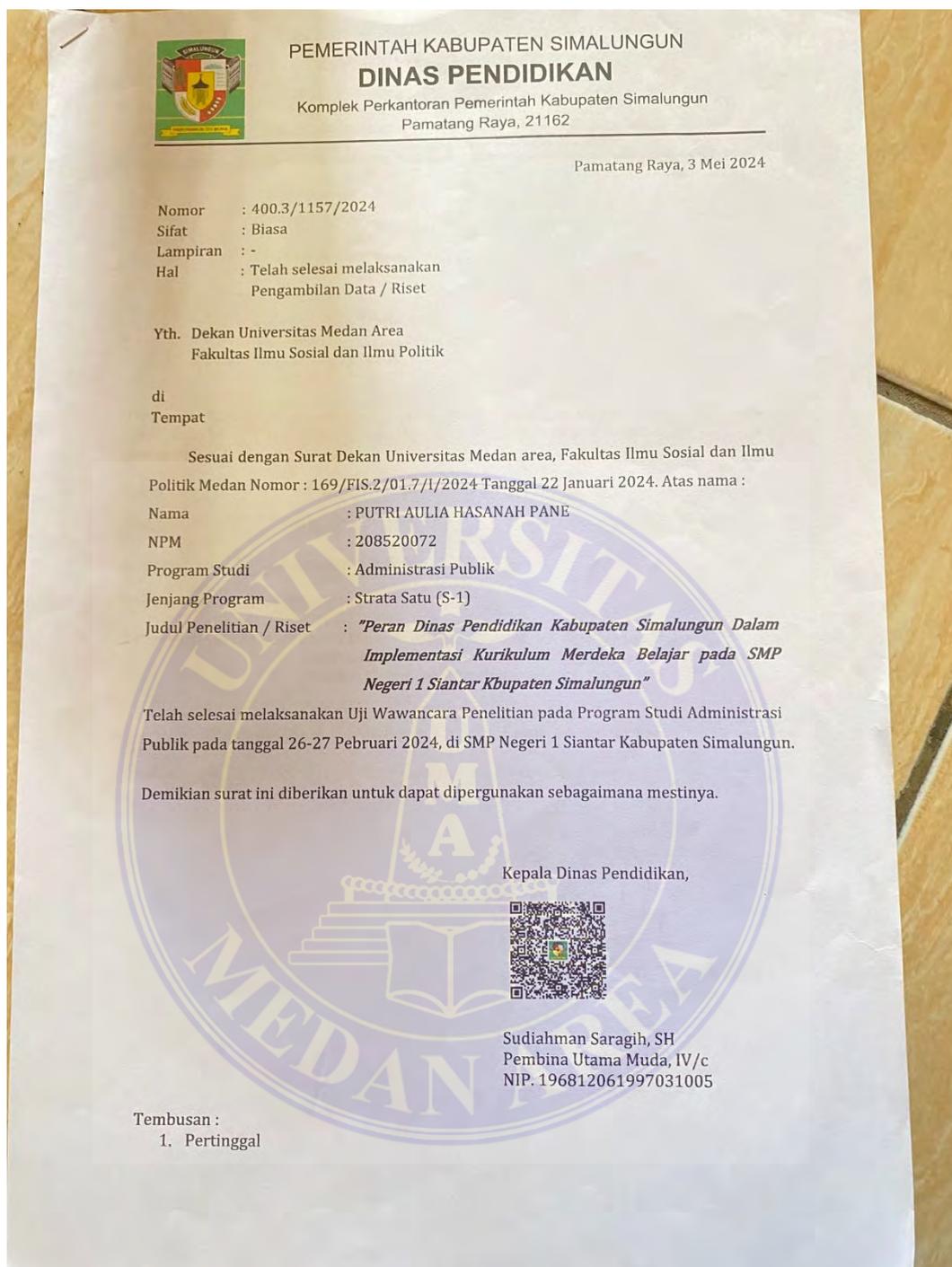
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

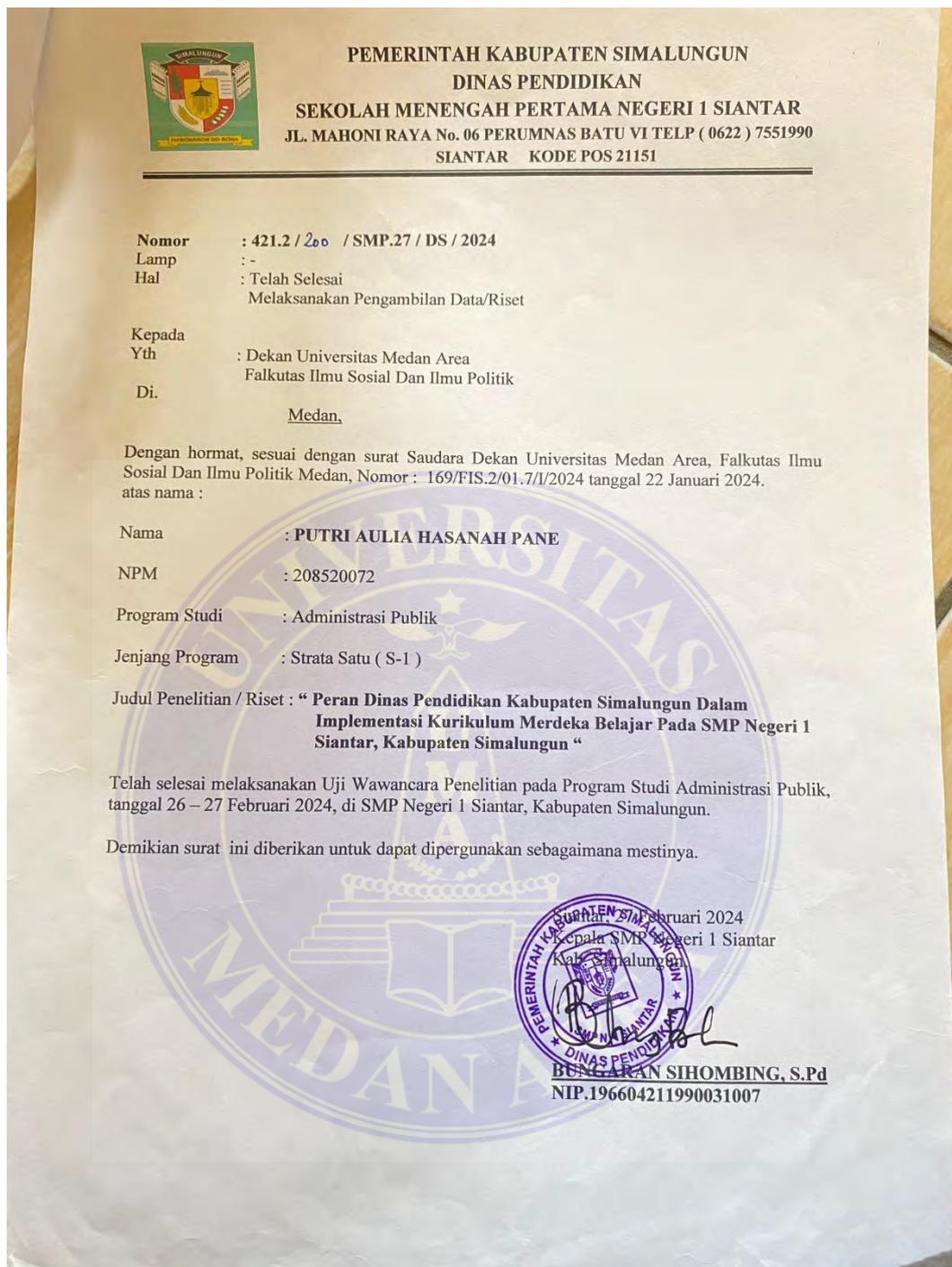
Dekan,

Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P.

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip







Lampiran 6 : Surat Edaran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244
Laman <https://bskap.kemdikbud.go.id>

SURAT EDARAN

NOMOR 0574/IIH3/SK.02.01/2023

TENTANG

PENDAFTARAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA SECARA MANDIRI
TAHUN AJARAN 2023/2024

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Kepala Satuan Pendidikan
di Seluruh Indonesia

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383); dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460).

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan aset bukti yang sah";
2. Dokumen ini telah diundangkan secara elektronik menggunakan bentuk elektronik yang diterbitkan oleh BSE

1. Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri merupakan pilihan bagi satuan pendidikan berdasarkan kesiapan masing-masing. Bagi satuan pendidikan yang memilih menggunakan Kurikulum Merdeka, ada 3 (tiga) pilihan kategori implementasi Kurikulum Merdeka:
 - a. Mandiri Belajar: Satuan pendidikan menggunakan struktur Kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen.
 - b. Mandiri Berubah: Satuan Pendidikan menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen.
 - c. Mandiri Berbagi: Satuan Pendidikan menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen, dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuka kembali pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri untuk Tahun Ajaran 2023/ 2024 mulai tanggal 6 Februari sampai dengan 31 Maret 2023 melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dengan mengakses <http://guru.kemdikbud.go.id/pendaftaran-ikm>. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran adalah sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran akan dan hanya dapat dilakukan melalui akun belajar.id yang dimiliki oleh kepala satuan pendidikan.
 - 1) Simak cara memeriksa ketersediaan akun belajar.id kepala satuan pendidikan melalui: <https://bit.ly/cara-dapatkan-akunbid-ptk-dinas>
 - 2) Simak cara memastikan bahwa akun belajar.id kepala satuan pendidikan telah aktif melalui: <https://bit.ly/panduanaktivasiakunbelajarid>
 - b. Informasi lengkap mengenai tata cara pendaftaran dapat mengakses: <https://bit.ly/PanduanpendaftaranKM2023>
3. Satuan pendidikan yang telah menjadi pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun 2022/2023 dengan status Mandiri Belajar dapat mengubah statusnya menjadi Mandiri Berubah atau Mandiri Berbagi, sedangkan satuan pendidikan yang telah berstatus Mandiri Berubah dapat mengubah statusnya menjadi Mandiri Berbagi, melalui <http://guru.kemdikbud.go.id/pendaftaran-ikm>.
4. Satuan Pendidikan yang telah menjadi pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022/2023 diharapkan melakukan refleksi sebagai bahan umpan balik bagi pemerintah melalui <http://guru.kemdikbud.go.id/pendaftaran-ikm>.
5. Satuan pendidikan yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan tidak perlu melakukan Pendaftaran dan refleksi implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berperan penting dalam mensosialisasikan dan mengawal implementasi Kurikulum Merdeka di daerah.

Satuan pendidikan yang akan menggunakan Kurikulum Merdeka secara mandiri pada tahun ajaran 2023/2024 perlu melakukan pendaftaran dan mempersiapkan diri sesuai dengan pilihan implementasi serta kesiapan masing-masing.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Informasi mengenai pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri pada tahun ajaran 2023/2024 dapat diakses di laman <http://kurikulum.kemdikbud.go.id/>, Instagram @kurikulum.merdeka, dan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Jika daerah dan satuan pendidikan mengalami kendala atau memiliki pertanyaan, dapat menghubungi Pusat Layanan Bantuan (*Help desk*) di nomor *WhatsApp* +62-81281435091.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Februari 2023
Kepala Badan,



Anindito Aditomo, Ph.D.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
4. Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
5. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Lampiran 7 : Dokumentasi Survei Penelitian Lapangan



Gambar Sekolah SMP Negeri 1 Siantar



Gambar Lingkungan Sekolah SMP Negeri 1 Siantar





Gambar Wawancara Dengan Wakil Bidang Kurikulum SMP Negeri 1 Siantar



7 dari 17



10 dari 17

Gambar Wawancara dengan Ibu Sarupah dan Bapak Christoni Panjaitan



7 dari 12



8 dari 12



9 dari 12

Gambar Wawancara dengan Siswi SMP Negeri 1 Siantar



Gambar Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun



Gambar Dalam Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun



Gambar Wawancara Dengan Kepala Dinas Kabupaten Simalungun



Gambar Wawancara dengan Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun